

**PENGARUH AKUNTABILITAS TRANSPARANSI DAN
PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
PADA DESA DI KECAMATAN SECANGGANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



OLEH :

NAMA : ADE LILI MARYANDA
NPM : 2005170114
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : ADE LILI MARYANDA
NPM : 2005170114
Program Studi : AKUNTANSI
Konsekrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH AKUNTABILITAS TRANSPARANSI DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DESA (APBDes) PADA DESA DI KECAMATAN SECANGGANG

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Penguji I

(Eka, SE., M.M., Ph.D.)

Tim Penguji

Penguji II

(Muhammad Fahmi, SE., M.Si., Ak., CA.)

Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA.)

Panitia Ujian

Ketua

(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CA.)



Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Ad Gunawan, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : ADE LILI MARYANDA
N P M : 2005170114
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH AKUNTABILITAS TRANSPARANSI DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) PADA DESA DI KECATAMAN SECANGGANG

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, 2024

Pembimbing Skripsi

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ADE LILI MARYANDA
N P M : 2005170114
Nama Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., Ak., CA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : PENGARUH AKUNTABILITAS TRANSPARANSI DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) PADA DESA DI KECAMATAN SECANGGANG

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	deskripsi data, diagram pre. pembahasan publik	11/5 24	3/1
Bab 5	Saran perhadap org. Abad yg beradab	11/5 24	2/1
Daftar Pustaka	—		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 2024

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hamim, S.E., M.Si)

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., Ak., CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ADE LILI MARYANDA
N P M : 2005170114
Nama Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., Ak., CA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH AKUNTABILITAS TRANSPARANSI DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) PADA DESA DI KECATAMAN SECANGGANG

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	-		
Bab 2	-		
Bab 3	Buat label validitas	6/5/24	3/1
Bab 4	Deskriptif serta perbaikan	6/5/24	3/1
Bab 5	Saran perbaikan	6/5/24	3/1
Daftar Pustaka			
Persetujuan Sidang Meja Hijau			

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan,

2024

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ADE LILI MARYANDA
N P M : 2005170114
Nama Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., Ak., CA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : PENGARUH AKUNTABILITAS TRANSPARANSI DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) PADA DESA DI KECAMATAN SECANGGANG

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	uji validasi & reliabilitas ke bab 3	3/5 24	2/
Bab 4	Berdasarkan data, analisis data (Rer ulang) pada kemebel, dan publik	3/5 24	2/
Bab 5	—	3/5 24	2/
Daftar Pustaka	—		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 2024

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., Ak., CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ADE LILI MARYANDA
N P M : 2005170114
Nama Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., Ak., CA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH AKUNTABILITAS TRANSPARANSI DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) PADA DESA DI KECATAMAN SECANGGANG

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	-		
Bab 2	-		
Bab 3	-		
Bab 4	-		
Bab 5	Kesimpulan diperbaiki	4/15/24	3/4
Daftar Pustaka	-		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc lanjut ke sidang	4/15/24	3/4

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Medan, 2024

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA)

ABSTRAK

PENGARUH AKUNTABILITAS TRANSPARANSI DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) PADA DESA DI KECAMATAN SECANGGANG

Ade Lili Maryanda

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
adelilimaryanda@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada Desa di Kecamatan Secanggang, pengaruh transparansi terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada Desa di Kecamatan secanggang, serta pengaruh peran perangkat desa terhadap pengelolaan anggaran dan belanja desa (APBDes) pada Desa di Kecamatan Secanggang. Penelitian ini merupakan penelitian Asosiatif dengan pendekatan Kuantitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes di Kecamatan Secanggang, dengan arah pengaruh positif. Hal ini yang artinya jika semakin baik akuntabilitas maka semakin baik pengelolaan APBDES yang di lakukan pada Pemerintah Desa Tersebut. Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes di Kecamatan Secanggang, dengan arah pengaruh positif. Hal ini yang artinya jika semakin baik Transparansi maka semakin baik pengelolaan APBDES yang di lakukan pada Pemerintah Desa Tersebut. Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes di Kecamatan Secanggang, dengan arah pengaruh positif. Hal ini yang artinya jika semakin baik Peran perangkat desa maka semakin baik pengelolaan APBDES yang di lakukan pada Pemerintah Desa Tersebut.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Peran Perangkat Desa, APBDes, Desa, Kecamatan Secanggang.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY, AND THE ROLE OF VILLAGE OFFICIALS ON THE MANAGEMENT OF VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET (APBDES) IN VILLAGES IN SECANGGANG SUBDISTRICT

Ade Lili Maryanda

*Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
adelilimaryanda@gmail.com*

This study aims to examine and analyze the influence of accountability on the management of village revenue and expenditure budgets (APBDes) in villages in Secanggang Subdistrict, the influence of transparency on the management of village revenue and expenditure budgets (APBDes) in villages in Secanggang Subdistrict, as well as the influence of the role of village officials on the management of village revenue and expenditure budgets (APBDes) in villages in Secanggang Subdistrict. This research is an associative study with a quantitative approach. The results of this study indicate that accountability has a positive influence on the management of APBDes in Secanggang Subdistrict, meaning that the better the accountability, the better the management of APBDes carried out by the Village Government. Transparency also has a positive influence on the management of APBDes in Secanggang Subdistrict, meaning that the better the transparency, the better the management of APBDes carried out by the Village Government. The role of Village Officials also has a positive influence on the management of APBDes in Secanggang Subdistrict, meaning that the better the role of village officials, the better the management of APBDes carried out by the Village Government.

Keywords: *Accountability, Transparency, Role of Village Officials, APBDes, Village, Secanggang Subdistrict.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya. Karena karunia dan rahmat-Nya penulis diberi kesempatan, kemudahan, dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul “ Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pada Desa di Kecamatan Secanggang “.

Shalawat beriring salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabatnya, semoga kita kelak mendapatkan Syafa'at dalam menuntut ilmu. Penulisan Proposal Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Melalui proposal skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya dan saudara kandung saya, Ayahanda tercinta Srianto dan Ibunda tersayang Markiseh, serta saudara kandung saya satu satunya Kaisyah Ariyanti yang telah memberikan semangat motivasi serta hiburan kepada penulis dan pihak-pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., MM.,M.Si,CMA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan.,S.E., M.Si Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr.Zulia Hanum, S.E., M.Si Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap,S.E. M.Si, Ak, CA, CPA selaku Sekretaris Program Studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak M. Firza Alpi, SE., M.Si Selaku Dosen Penasehat Akademik Kelas Akuntansi C Pagi Stambuk 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA Selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulis menyelesaikan proposal Skripsi ini.
9. Kepada Seluruh Staf Pegawai di Kantor Desa Kecamatan Secanggang yang telah memberikan izin tempat riset dan dukungan kepada penulis.
10. Terima Kasih Kepada seluruh keluarga besar saya yang selalu mendukung, mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis.

11. Terima kasih kepada partner saya M.Rifan Efendi yang sudah memberikan motivasi, dukungan serta doa kepada penulis, yang sudah rela mendengarkan keluh kesah, rela menghadapi mood yang kurang baik dan hingga selalu hadir dalam setiap moment penting bagi penulis.
12. Terima kasih untuk teman-teman dekat saya Irda Elyana Sutami & Indah Widia Fitri yang selalu sama sama memberikan dukungan dan Motivasi dalam penulisan skripsi ini.
13. Seluruh teman-teman penulis dari kelas C akuntansi Pagi, Kelas B Akuntansi Malam dan Kelas Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik Stambuk 2020 semoga kita akan sukses semuanya.
14. Terakhir terima kasih untuk diri sendiri, terima kasih untuk tidak pernah menyerah dan mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis Mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu segala proses penyusunan proposal skripsi ini dan juga mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun untuk penyempurnaan proposal skripsi ini. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Medan, 2024

Ade Lili Maryanda

2005170114

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Identifikasi masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori agensi (<i>Agency Theory</i>)	11
2.1.2 Akuntabilitas	12
2.1.3 Transparansi	15
2.1.4 Peran Perangkat desa	17
2.1.5 Pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES)	20
2.2 Kerangka Berpikir Konseptual	28
2.3 Hipotesis	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Definisi Operasional	33
3.3 Tempat dan waktu Penelitian	35
3.3.1 Tempat Penelitian	35
3.3.2 Waktu Penelitian	35
3.4 Jenis dan Sumber Data	36
3.4.1 Jenis Data	36
3.4.2 Sumber Data	36

3.5 Teknik Pengambilan Sampel	36
3.5.1 Populasi	36
3.5.2 Sampel	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data	39
3.7 Uji Instrument Data	40
3.7.1 Uji validitas.....	40
3.7.2 Uji Reabilitas	46
3.8 Teknik Analisis Data	48
3.8.1 Analisis outer model (Model Pengukuran).....	49
3.8.2 Analisis Inner model (Model Struktural).....	50
3.9 Uji Hipotesis	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Hasil Penelitian.....	52
4.1.1 Gambaran umum Penelitian	52
4.1.2 Identitas Responden.....	52
4.1.3 Deskripsi Data	54
4.1.1 Inner Model (Model Struktural).....	67
4.1.2 Uji Hipotesis	68
4.2 Pembahasan	69
4.2.1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa di Kecamatan Secanggang	69
4.2.2. Pengaruh Transpransi Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Pada Desa Di Kecamatan Secanggang	72
4.2.3. Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa (Apbdes) Pada Desa Di Kecamatan Secanggang	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir Konseptual.....	31
Gambar 3.1 Model Persamaan Struktural	51
Gambar 4.1 Identitas Berdasarkan Usia.....	53
Gambar 4.2 Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Tabel Laporan APBDes Pada Desa di Kecamatan Secanggang Tahun 2023	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	34
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	35
Tabel 3.3 Tempat Penelitian	37
Tabel 3.4 Skor Skala Ordinal	40
Tabel 4.1 Deskripsi Data Variabel Akuntabilitas (X1).....	54
Tabel 4.2 Deskripsi Data Variabe Transparansi (X2).....	56
Tabel 4.3 Convergent Validity Variabel Peran Perangkat Desa (X2)	57
Tabel 4.4 Deskripsi Data Variabel Pengelolaan APBDes (Y).....	60
Tabel 4.5 Cross Loading	64
Tabel 4.6 Composite Reliability	66
Tabel 4.7 Average Variance Extracted (AVE)	67
Tabel 4.8 Model Stuktural atau Inner Model (R-Square)	67
Tabel 4.9 Uji Hipotesis	68

DAFTAR LAMPIRAN

Permohonan Judul Penelitian.....	1
Persetujuan Judul Penelitian	2
Permohonan Izin Penelitian	3
Surat Izin Riset Pendahuluan	4
Surat Balasan Izin Riset Dari Instansi/Perusahaan	5
Penetapan Dosen Pembimbing Proposal/Skripsi Mahasiswa	6
Berita Acara Bimbingan Proposal.....	7
Berita Acara Seminar Program Studi Akuntansi	8
Pengesahan Proposal	9
Surat Menyelesaikan Riset.....	10
Surat Balasan Selesai Riset dari Instansi/Perusahaan	11
Kuesioner Penelitian	12
Identitas Responden	13
Hasil Jawaban Kuesioner	14
Hasil Olah data SEMPLS.....	15
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	16
Daftar Riwayat Hidup	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

UU No.6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa tersebut disebut dengan otonomi desa.

Desa sebagai otonom memiliki hak-hak istimewa, seperti pengelolaan keuangan desa. Dalam UU No.6 Tahun 2014, segala hak dan kewajiban di desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang dan benda fisik yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, termasuk dalam ruang lingkup keuangan desa. Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa yang dibeli atau diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau hak lain yang sah termasuk dalam aset desa.

Pengelolaan keuangan desa (Soleh,2015) adalah pengelolaan keuangan desa (APBDes) yang mencakup perencanaan,penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sementara itu menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 14 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Umami,2017).

Menurut Badan Pengawas keuangan dan pembangunan (2015) Pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dilaksanakan berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia(SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Besarnya dana desa yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpretasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bagian dari keuangan desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan Badan permusyawaratan desa (BPD) yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun (Maryani & Rusmianti, 2018).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan susunan rencana atau tatanan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sangat penting perannya bagi pemerintah desa karena APBDes merupakan komponen utama dalam pembangunan desa, serta menjadi arah pembangunan kebersamaan, dan meningkatkan kesejahteraan maupun meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang hidup dengan sumber daya yang terbatas dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap kehidupan masyarakat desa.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Kecamatan tersebut memiliki 10 desa yaitu Desa Telaga jernih, Kebun kelapa, Sungai ular, Secanggang, Cinta raja, Karang anyar, Suka mulia, Teluk, Pantai gading, Karang Gading. Alasan Peneliti Memilih Desa di Kecamatan Secanggang sebagai Obyek penelitian adalah karena faktor geografis dan Praktis seperti keterbatasan waktu, biaya dan tenaga.

Berikut Tabel Laporan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada desa di kecamatan secanggang tahun 2023:

Tabel 1.I. Tabel Laporan APBDes Pada Desa di Kecamatan Secanggang Tahun 2023

No	Wilayah/Desa	Pendapatan (Dalam Rupiah)			Belanja (Dalam Rupiah)		
		Anggaran	Realisasi	Presentasi	Anggaran	Realisasi	Prsentasi
1.	Telaga Jernih	1.817.544.000	1.719.500.000	99,65%	1.823.222.985	1.700.298.000	99,60%
2.	Kebun Kelapa	1.610.479.000	1.558.890.000	99,04%	1.605.593.099	1.501.235.000	99,10%
3.	Kepala sungai	1.592.290.000	1.590.300.000	99,85%	1.603.438.128	1.603.438.128	100%
4.	Secanggang	2.110.959.000	2.000.898.000	99,14%	2.156.167.063	2.156.167.063	100%
5.	Cinta Raja	1.150.545.000	1.049.168.016	89,99%	1.168.262.795	1.056.173.440	85,89%
6.	Perkotaan	1.340.134.000	1.340.134.000	100%	1.372.458.345	1.261.930.639	89,99%
7.	Suka mulia	1.680.973.140	1.470.487.000	99,4%	1.664.009.520	1.467.000.320	88,79%
8.	Sungai Ular	1.216.250.000	1.216.250.000	100%	1.233.831.884	1.233.831.884	100%
9.	Pantai Gading	2.064.926.000	2.064.926.000	100%	2.044.926.000	2.044.926.000	100%
10.	Karang Gading	1.735.743.346	1.734.837.691	100%	1.758.728.457	1.711.237.839	99,79%

Sumber : <https://sid.kemendes.go.id>

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan dan belanja desa pada desa di Kecamatan Secanggang terkait Anggaran dan realisasi telah di realisasikan dengan baik, Dari beberapa desa di Kecamatan Secanggang Jumlah APBDes tertinggi di peroleh oleh desa Secanggang dengan total pendapatan Sebesar Rp. 2.110.959.000 dan Total Belanja Sebesar Rp. 2.156.167.063. Sedangkan jumlah APBDes yang terendah di peroleh Desa Sungai Ular dengan total pendapatan sebesar Rp. 1.216.250.000 dan total belanja sebesar Rp. 1.233.831.884.

Namun Permasalahan yang ditemukan pada beberapa desa di Kecamatan Secanggang yaitu Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban belum dilakukan secara optimal, terlihat dari pelaksanaan pada beberapa desa yang Presentase laporan APBDes nya belum semua nya terealisasikan 100%. Dilihat dari Peraturan desa No 7 tahun 2023 tentang APBDes menyatakan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja desa harus terealisasikan seluruhnya(100%).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah akuntabilitas,transparansi dan peran perangkat desa itu sendiri. Menurut (Umami,2017) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau tindakan seseorang/badan Hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan suatu pertanggungjawaban. (Fajri,2015) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

hasil yang ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Fenomena dari variabel Akuntabilitas adalah dalam hal pertanggungjawaban laporan keuangan yaitu masih terdapat desa yang belum melaporkan Laporan pertanggungjawaban APBDes. Dalam Permendagri No 20 tahun 2018 Kepala desa wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang tersaji Kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Transparansi merupakan aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintah yang baik, Perwujudan tata pemerintah yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah, Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya (Umami, 2017). Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Permasalahan dari variabel transparansi adalah di duga salah satu kades tidak transparan dalam penggunaan APBDes pada tahun 2023 dapat dilihat dari tidak adanya papan informasi mengenai Pengelolaan dana desa. Berdasarkan peraturan desa nomor 7 tahun 2022 menyatakan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa.

Peran Perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, jenis, kedudukan dan tugas nya. Jadi tidak ada lagi perangkat desa yang tidak membantu dalam pengelolaan Apbdes dan tidak ada lagi kepala desa yang mengelola sendiri Apbdes untuk kepentingan sepihak. Dengan berperannya perangkat desa itu sendiri akan menjadi lebih akuntabel dan transparan. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (Good Governance) yang dicirikan demokratis juga desentralistis secara baik (Indrisari, 2017). Penelitian ini sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa ada hubungan kontraktual antara principal dan agen dimana kepala desa bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan terhadap perangkat desa sebagai agen yang ikut berperan dalam akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dari Penjelasan diatas, Memiliki makna bahwa Akuntabilitas, Transparansi dan Peran perangkat desa memiliki peran penting yang saling berkaitan dan sangat dibutuhkan dalam suatu pemerintahan. Dengan adanya Transparansi maka akuntabilitas dapat diterapkan dengan baik. Secara garis besar Akuntabilitas dan Transparansi adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa kepada masyarakat secara jujur dan terbuka melalui media penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat. Akuntabilitas dan Transparansi dapat digunakan untuk mencegah terjadinya penyelewengan atau manipulasi dimana hal tersebut hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja dan merugikan pihak lain.

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang Akuntabilitas dan Transparansi diantaranya dilakukan oleh (Melia widia rahmayani&Engkun Kurnadi.,2022) yang berjudul “ Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (studi pada seluruh Desa di kecamatan Kadipaten)”Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBDes, Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBDes. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Vini Agustiana) yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa , Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

Berdasarkan ketidak konsistenan dari penelitian terdahulu, latar belakang serta fenomena yang terjadi Peneliti memiliki ketertarikan melakukan penelitian ini dengan menambahkan variabel X3 yaitu Peran Perangkat Desa,Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDes) Pada Desa di Kecamatan Secanggang “

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan Uraian dan Latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban belum dilakukan secara optimal.
2. Masih terdapat Desa yang belum melaporkan Laporan pertanggung jawaban APBDes.
3. Kurangnya Transparansi Perangkat desa Kepada Masyarakat Mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Pada Desa di Kecamatan Secanggang?
2. Apakah Transparansi Berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Pada Desa di Kecamatan Secanggang?
3. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada desa di Kecamatan secanggang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan Masalah diatas, Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada Desa di Kecamatan Secanggang.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada Desa di Kecamatan secanggang.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh peran perangkat desa terhadap pengelolaan anggaran dan belanja desa (APBDes) pada Desa di Kecamatan Secanggang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara Lain :

1. Bagi peneliti sebagai langkah awal dalam pengaplikasiannya ilmu yang diperoleh selama duduk di bangku kuliah serta menambah wawasan dan imu pengetahuan mengenai pengaruh akuntabilitas,transparansi dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
2. Bagi pihak Kantor desa pada Kecamatan Secanggang sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi desa dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Sehingga dapat meningkatkan kesehateraan masyarakat setempat.
3. Bagi peneliti lain sebagai bahan acuan dan pertimbangan yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta sangat diharapkan dapat diperguankan sebagai bahan refrensi

dalam penyusunan tugas akhir atau melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di kemudian hari.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori agensi (Agency Theory)

Teori agensi dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara akuntabilitas, transparansi dan peran perangkat desa dan pengelolaan Apbdes. Dalam konteks ini, teori agensi mengacu pada hubungan antara pemegang kepentingan (Perangkat Desa) yang bertindak sebagai agen dan masyarakat (Pemilik Modal) yang mempercayakan mereka untuk mengelola Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Menurut Ismail dkk (Ismail et al., 2016) Agency Theory adalah penjelasan hubungan kontraktual antara egen dan parcipal. Pihak Agent merupakan pihak yang mendapatlan amanat daro pihak principal untuk melaksanakan seluruh aktivitas atas nama principals, dalam hal ini agent memiliki kapasitas selaku pengambil keputusan. Teori keagenan akan tepat untuk menjelaskan hubungan principal dan agen dalam pengelolaan Apbdes (Rahmayani, 2022).

Dalam teori agensi, isu-isu yang relevan termasuk masalah keagenan, informasi asimetris dan insentif. Pemerintah desa (perangkat desa) memiliki kewajiban untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa (Apbdes) dengan transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Namun, ada potensi Konflik keagenan dimana perangkat desa unkin memiliki insentif untuk tidak mengelola dana dengan baik, karena mereka dapat memiliki kepentingan pribadi atau kurangnya pengawasan. Akuntabilitas dan transparansi dapat membantu

mengatasi masalah informasi asimetris dengan memberikan masyarakat akses informasi yang diperlukan untuk mengawasi pengelolaan dana desa. Peran perangkat desa yang efektif juga dapat mempengaruhi hasil pengelolaan Apbdes.

Dengan Menggunakan kerangka teori agensi, penelitian dapat menguji sejauh mana akuntabilitas, transparansi dan peran perangkat desa mempengaruhi pengelolaan Apbdes serta apakah mereka membantu mengatasi masalah keagenan yang mungkin muncul dalam konteks pengelolaan dana desa.

2.1.2 Akuntabilitas

2.1.2.1 Pengertian akuntabilitas

Mahsun (2016, hal. 169) secara sempit Akuntabilitas adalah Bentuk Pertanggung jawaban yang mengacu kepada siapa organisasi atau pekerja individu yang bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggung jawab. Sedangkan dalam pengertian luas akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan petanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab nya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas dapat di artikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodic (Edowati et al., 2021).

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah segala bentuk pertanggung jawaban aparatur pemerintah desa mulai dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan harus benar benar dilaporkan dan

dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang baik membutuhkan sistem akuntabilitas yang berarti kinerja pemerintah tingkat desa mulai dari perencanaan untuk bertanggung jawab atas penggunaan anggaran, bertanggung jawab kepada pemerintah dan aparatur desa, serta melaporkan kepada masyarakat dan jajaran pemerintahan yang lebih tinggi sesuai dengan Perundnag –undangan (Astomo, 2018). Akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kinerja instansi pemerintah sehingga menjadi pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Akuntabilitas mencakup dua jenis yaitu Akuntabilitas vertical dan akuntabilitas Horizontal (Mahmudi, 2013, p. 9).

Dalam Pengelolaan Apbdes Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban kepala desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Apbdes yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban Periodik. Menurut (2016). Akuntabilitas dalam proses pengelolaan Apbdes adalah kesediaan dari para pengelolaan Apbdes untuk menerima Tanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

2.1.2.2 Jenis – jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Maka pentingnya akuntabilitas dalam Pengelolaan Apbdes sebagi unsur utama Good governance antara lain tercermin dari berbagai kategori akuntabilitas.

Menurut Schedler dan plano dalam Manggaukang (2006, hal. 10) membedakan ada lima jenis akuntabilitas, Yaitu :

- a) Akuntabilitas fisik-tanggungjawab atas dana public.
- b) Akuntabilitas legal-tanggungjawab untuk mematuhi hukum.
- c) Akuntabilitas program-tanggungjawab untuk menjalankan suatu program.
- d) Akuntabilitas proses-tanggungjawab untuk melaksanakan prosedur.
- e) Akuntabilitas Outcome-tanggungjawab atas hasil.

Selanjutnya Sheila elwood dalam Manggaukang (2006, hal. 35) mengemukakan ada empat jenis akuntabilitas, yaitu :

- a) Akuntabilitas Hukum dan peraturan.
- b) Akuntabilitas Proses.
- c) Akuntabilitas Program.
- d) Akuntabilitas Kebijakan.

Memperhatikan jeni-jenis akuntabilitas seperti dikemukakan Sheila Elwood diatas, maka pemerintah desa didalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya disamoing harus berakuntabilitas menurut umum dan peraturan , juga dalam proses pelaksanaan tugas dan tenggungjawabnya, dalam program yang diimplementasikan dan juga dalam kebijakan yang dibuat atau dirumuskan.

2.1.2.3 Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

2. Pelaporan

3. Pertanggungjawaban

2.1.3 Transparansi

2.1.3.1 Pengertian Transparansi

Menurut (Mahmudi 2016:17) Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Menurut (Ritonga & Syahrir, 2016) transparansi tidak hanya sebatas ketersediaan informasi dan informasi tersebut dapat diakses oleh publik, namun juga disajikan (dipublikasikan) dengan tepat waktu. Informasi yang dipublikasikan dengan tepat waktu tentunya akan lebih bermanfaat dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan publik terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa.

Menurut (Nurhayati,2017) menyatakan bahwa definisi transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undang. Menurut (Hoesada 2019:273) Asas transparansi mengandung untuk pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan desa.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dengan kata lain transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

2.1.3.2 Karakteristik Transparansi

Transparansi memiliki tiga karakteristik . (Mardiasno:2018;19) mengemukakan karakteristik transparansi yaitu sebagai berikut :

a. Informatif.

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada Stakeholders yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

b. Keterbukaan.

Keterbukaan Informasi publik memberikan hal kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi .

c. Pengungkapan

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (Stakeholders) aktifitas dan kinerja finansial.

2.1.3.3 Indikator Transparansi

Menurut Andrianto(2007:21) bahwa indikator transparansi terdiri dari :

a. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi.

- b. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.
- c. Adanya audit independen dan efektif.
- d. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.

2.1.4 Peran Perangkat desa

2.1.4.1 Pengertian peran perangkat desa

Peran merupakan suatu posisi atau dengan kata lain adalah tingkat jabatan kedudukan seseorang ketika melakukan kewajiban dan haknya sesuai dengan tingkatan yang dijalani (Soekanto,2002). Sebuah kesatuan dari pemerintah desa yang dijalankan oleh beberapa perangkat desa yang memiliki peran seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta perangkat desa lainnya untuk menjadi dapat tercapainya tujuan dalam pemerintah desa (Anggraeni&Laila Yuliani,2019). Bentuk dan hubungan interaksi seseorang dapat menggambarkan sebuah peran dalam suatu entitas tertentu. Kepala desa yang memegang peran penting pada perangkat desa dalam memajukan pemerintah desa harus aktif melakukan pengawasan, perencanaan, penentuan arah organisasi, dan pengorganisasian (Dewi&Gayatri,2019).

2.1.4.2 Fungsi Peran Perangkat Desa

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48 dan 49, sesuai dengan kedudukannya perangkat desa memiliki peran dan fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Sekretaris Desa, yaitu :
 - a. Mempersiapkan pertemuan untuk rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin.

- b. Membantu untuk menyusun peraturan desa.
 - c. Menyampaikan materi yang berhubungan dengan pelaporan pelaksanaan pemerintah desa.
 - d. Menjalankan kegiatan administrasi dan mempersiapkan materi untuk kepala desa agar pekerjaannya lancar.
2. Pelaksana kewilayahan, antara lain :
- a. Bekerja sama membina swadaya untuk masyarakat.
 - b. Membantu pelaksanaan kegiatan dan pembinaan Masyarakat dengan kepala desa.
 - c. Menentukan kebijakan dan keputusan bersama kepala desa.
 - d. Mengelola dan membangun administrasi pemerintahan.
 - e. Ikut bertanggungjawab membantu melaksanakan kepentingan kepala desa dilingkungan kerja tertentu.
3. Pelaksana urusan atau teknis bagian kesekretariatan yang memiliki tanggungjawab atas Kepala desa :
- a. Kepala urusan pembangunan yaitu penanggungjawab pengelola administrasi pembangunan berfokus pada pembangunan desa.
 - b. Kepala urusan umum focus pada bidang pengelolaan umum bertanggungjawab atas penyedia, pengendalian, perbaikan alat tulis serta masuk dan keluarnya surat sesuai setiap fungsi.
 - c. Kepala urusan keuangan dipercaya dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan pemerintah desa.

- d. Kepala urusan pemerintahan berhubungan dengan permasalahan yang diaturoleh setiap bagian lembaga dan masyarakat atau administrasi pemerintah.
- e. Kepala urusan kesejahteraan rakyat berfokus pada tanggungjawab pelaksanaan dan persiapan terkait kesejahteraan social masyarakat.

2.1.4.3 Dimensi peran perangkat desa

Terdapat beberapa dimensi peran menurut Edi Suharto(2006),yaitu :

1. Peran kebijakan, mereka penganut gagasan ini meyakini dengan penerpan kebijakan yang benar dan sesuai kedudukan peran dapat membuat terlaksana dengan baik.
2. Peran sebagai alat untuk komunikasi terkait keputusan masyarakat dan keprihatinannya di setiap lapis untuk mendokumentasikannya secara menyeluruh dan dapat dipercaya.
3. Peran menjadi alat penyelesaian sengketa menerima masukan berupa informasi selama proses pengambilan keputusan sehingga pelayanan yang baik akan diberikan pemerintah untuk masyarakat dan segera memperoleh tanggapan cepat dan bertanggung jawab.
4. Peran sebagai strategi, pengikut paham ini mengadakan susunan rencana sehingga akhirnya beroleh bantuan bagi masyarakat.

2.1.4.4 Indikator Peran Perangkat Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa berikut merupakan indikator terkait peran perangkat desa yaitu sebagai berikut :

1. Peran Perangkat desa pada proses perancang, pelaksanaan, pelaporan dan penatausahaan penggunaan anggaran dana desa.
2. Peran perangkat desa untuk pemberian masukan mengenai perubahan RAPBDes pada Kepala Desa atau BPD.
3. Peran perangkat desa memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa.
4. Peran perangkat desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberian bimbingan kepada masyarakat.

2.1.5 Pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES)

2.1.5.1 Pengertian APBDes

Anggaran Pendapatan dan belanja desa, selanjutnya disebut dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa (Permendagri No 113 tahun 2014) Dalam permendagri tersebut menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud adalah uang yang menimbulkan pendatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, menurut (Astuty dan Hany Farida,2018), APBDes adalah rencana keuangan tahunan desa yang didasarkan pada peraturan desa mengenai prediksi pendapatan dan belanja sebagai sumber pembiayaan untuk kegiatan pembangunan desa. Struktur APBDes terdiri Atas :

a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah seluruh penghasilan yang menjadi hak desa di tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali yang terdiri atas pendapatan asli desa(PADes), pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain

(Julia & Abdullah,2020). Menurut (Wijaya & Roni 2019), Sumber PADes berasal dari hasil usaha, hasil asset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan pendapatan asli desa lain. Pendapatan transfer mencakup dana desa, bagian dari hasil retribusi dan pajak daerah kabupaten?kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari APBD provinsi, dan bantuan keuangan APBD Kabuoaten/kota. Pendapatan lain-lain meliputi penghasilan dari hasil kerja ssama, penghasilan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa, penghasilan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga,koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran, bunga bank, dan pendapatan lain desa yang sah.

b. Belanja desa

Belanja desa adalah seluruh pengeluaran sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan kewenangan desa yang menjadi kewajiban di tahun anggaran yang tidak di terima kembali (Julita & Abdullah,2020). Belanja desa diklasifikasikan menjadi lima kelompok, yaitu pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan kemasyaratkatan desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Menurut jenisnya , belanja desa dikalsifikasikan menjadi 4 yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja tak terduga.

c. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa adalah seluruh penerimaan yang akan dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran

saat ini atau berikutnya (Julita & Abdullah,2020). Pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup tiga bagian yaitu SILPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Pengeluaran pembiayaan meliputi dua bagian yaitu penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan.

2.1.5.2 Manfaat APBDes

APBDes pada dasarnya disusun untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDes, Pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Sumpeno,2011:213).

Secara rinci manfaat penyusunan APBDes diantaranya:

- a. APBDes sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana pendukung.
- b. Indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang di bebaskan kepada masyarakat secara proporsional.
- c. Bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain di luar pendapatan asli desa, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain.
- d. Memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

- e. Memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintah desa.
- f. Gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah desa setiap tahun anggaran.
- g. memberi isi terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa dalam mewujudkan good governance.
- h. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif.

2.1.5.3 Penyusunan dan Pelaksanaan APBDes.

Berikut ini uraian langkah-langkah penyusunan APBDes yang dikutip dari tim P3M-OTDA (2002) :

- 1.) Penyusunan Rancangan APBDes
 - a. Disusun dan diajukan oleh Kepala desa dan BPD
 - b. Sebaiknya di konsultasikan kepada elemen masyarakat, misalnya
 - c. melalui dialog, rapat dengar pendapat, dll.
 - d. Hasil Konsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi RAPBDes.
 - e. RAPBDes yang telah disempurnakan dan diajukan dalam rapat pembahasan dan penetapan APBDes.
- 2.) Pembahasan RAPBDes
 - a. Sebelum disampaikan dalam BPD, naskah RAPBDes harus sudah diterima oleh anggota BPD dan Pemerintah Desa (selambalambatnya 7x24 sebelumnya).

- b. RAPBDes usulan Kepala Desa disampaikan kepada pimpinan BPD dengan surat pengantar dari kepala desa. RAPBDes usulan anggota BPD disampaikan secara tertulis (surat pengantar) dari pengusul kepada pimpinan BPD.
 - c. RAPBDes yang telah disampaikan kepada pimpinan BPD, selanjutnya di disposisikan kepada sekretaris BPD untuk diberi nomor.
 - d. RAPBDes yang telah mendapatkan nomor, diumumkan dalam rapat peripurna bahwa RAPBDes telah diperbanya dan dibagikan kepada semua anggota BPD/Komisi.
 - e. Penjelasan RAPBDes dari pihak pengusul (Pemdes datau para pengusul dari anggota BPD).
 - f. Pemandangan umum dari anggota BPD dan Pemerintah Desa.
 - g. Pembahasan dalam komisi bersama Pemerintah Desa dan atau pengusul.
 - h. Pendapat komisi sebagai tahapan menuju pengambilan keputusan.
- 3.) Persetujuan dan Pengundangan APBDes.
- a. Apabila RAPBDes tidak disetujui, maka dalam jangka waktu tertentu.
 - b. Apabila RAPBDes yang disempurnakan tersebut belum disetujui, maka diupayakan melalui pendekatan (loby) beberapa pihak yang belum menyetujui.
 - c. RAPBDes yang telah disetujui BPD, harus sudah dismapaikan kepada pemerintah desa, misalnya selambat-lambatnya 7 hari

setelah rapat BPD untuk di tandatangani atau disahkan menjadi APBDes oleh Kepala Desa.

d. Apabila RAPBDes yang diajukan oleh kepala desa dan atau sebagian anggota BPD tidak mendapat persetujuan BPD, maka pemerintah desa dapat menggunkan APBDes tahun lalu.

4.) Peraturan Pelaksanaan APBDes

a. Kepala desa dapat menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes yang dituangkan dalam keputusan Kepala Desa.

b. Keputusan Kepala Desa tersebut harus disampaikan kepada BPD dengan tembusan Bupati dan Camat selambat-lambatnya 15 hari setelah ditetapkan untuk keperluan pengawasan.

2.1.5.4 Indikator APBDes

APBDes pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Indikator APBDes sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah Sebagai Berikut :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Vini Agustiana	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi dana Desa	Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan secara parsial bahwa Akuntabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa hal tersebut bisa dilihat dari Uji t karena $Sig\ 0,613 > 0,05$. Adanya pengaruh Transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa hal tersebut bisa dilihat dari Uji t karena $Sig\ 0,001 < 0,05$. Adanya pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa. Maka secara simultan yang dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen karena memiliki nilai F 6,197. Hasil penelitian nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 11,4%, maka hasil penelitian dapat diinterpretasikan bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, artinya jika Akuntabilitas meningkat maka Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa juga meningkat, Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, artinya jika Transparansi meningkat maka Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa juga meningkat. Serta sebesar 88,6% Akuntabilitas dan Transparansi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
	Citra Kumala Dewi, M.Ikbal A, Fadli Moh	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi Terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu. Akuntabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu. Transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu. Komitmen

			Organisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu
	Rahmi Fajri, Endah Setyowati, Siswidiyanto	Akuntabilitas Pemerintahan desa pada pengelolaan alokasi dana desa	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah dalam pengelolaan keuangan perlu menerapkan prinsip good governance yaitu akuntabilitas khususnya pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD bantuan pemerintah kepada desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mengelola ADD tersebut maka diperlukan aparat pemerintah yang memiliki kemampuan serta bertanggungjawab dalam mengelola dana tersebut. Pengelolaan ADD di Desa Ketindan berlandaskan pada Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2012. Pemerintah Desa Ketindan telah membuktikan komitmennya atau tanggung jawabnya dengan cara mematuhi dan mengikuti tahapan serta ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Malang. Dalam penerapannya masih ditemukan permasalahan yakni pada besar jumlah persentase yang sedikit melebihi yang ditetapkan selain itu ditemukan program saat perencanaan tidak tercantum dalam RPD namun dalam realisasi keuangannya tercantum. Perihal tersebut diharapkan pemerintah Desa Ketindan untuk memperhatikan terkait pengklasifikasian program sehingga tidak terulang permasalahan tersebut.
	Elgis Astuty, Eva Hany Fanida	Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDES) Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintahan desa sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2011. Secara Madiun sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan pengelolaan ADD, yaitu pada tahap pelaksanaan, pelaksanaan program posyandu lansia hanya berjalan selama enam bulan dan selanjutnya program ini tidak berjalan. Namun demikian, sisa dana posyandu lansia yang tidak berjalan tersebut dialihkan untuk kegiatan lain tanpa menyertakan bukti penggunaan yaitu kwitansi sesuai

			dengan ketetapan yaitu peraturan Bupati Madiun nomor 8 tahun 2011.
	Suci Indah Hanifah	Akuntabilitas dan Transparansi Petanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes)	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan desa kepatihan sudah berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri No.37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggung jawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

2.2 Kerangka Berpikir Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka konseptual dalam penelitian menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antara variabel dalam proses analisisnya. Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan dan menghubungkan secara panjang lebar tentang topik yang dibahas untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh hubungan antara variabel independen yaitu akuntabilitas,transparansi dan peran perangkat desa, dengan variabel dependen yaitu Pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Teory Agency berkaitan dengan Variable akuntabilitas, mengingat akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari agent (perangkat desa) atas kegiatan penyelenggaraan pemeritah desa kepada principal(Masyarakat desa).Dengan demikian semakin baik akuntabilitas atas suatu kegiatan maka cenderung akan semakin baik Pengelolaan APBDes yang terjadi. Hasil penelitian

yang mendukung pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yaitu dilakukan oleh (Melia widia Rahmayani & Engkun kurnadi., 2022) yang menyatakan Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Penelitian yang dilakukan oleh (Karisma Nur Elvina., 2023) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan dana APBDes. Penelitian yang dilakukan oleh (Rendi saputra, Darmanto, Sehesti Ningsih, 2022) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Berpengaruh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penelitian yang dilakukan oleh (Widia Sukma Tangahu, Harun Blangkod, Lukman Pakaya, 2022) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Penelitian yang dilakukan oleh (Putra Adi Kurniawan, 2019) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

2. Pengaruh Transparansi dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

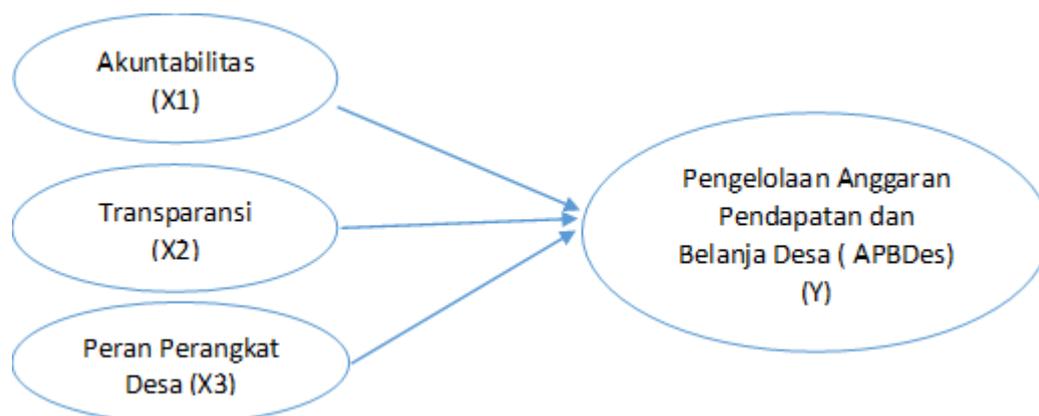
Transparansi adalah dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan faktor-faktor yang sifatnya material Secara bertahap kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa (Hanifah & Praptoyo, 2015). Hasil penelitian yang mendukung Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yaitu dilakukan oleh (Melia widia Rahmayani & Engkun Kurnasi., 2022) yang menyatakan Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan

terhadap pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Penelitian yang dilakukan oleh (Karisma Nur elvina,2023) Hasil penelitian ini menunjukkan Transparansi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengelolaan dana APBDes. Penelitian yang dilakukan oleh (Rendi saputra,Darmanto,Sehesti Ningsih,2022) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi Berpengaruh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penelitian yang dilakukan oleh (Putra Adi Kurniawan,2019) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Vini Agustiana,2020) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

3. Pengaruh Peran Perangkat desa dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Peran perangkat desa salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintahan yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa (Gunawan,2013). Peran perangkat desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dikatakan cukup berperan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa. Hasil penelitian yang mendukung pengaruh peran perangkat desa dalam Pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yaitu dilakukan oleh (Kusumaningrum,et al.,2019) yang menyatakan pengaruh positif peran perangkat

desa dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Penelitian yang dilakukan oleh (Neny Tri Indrianasari, 2017) Hasil penelitian ini Perangkat desa telah berperan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Ulfah Andriani, Tatik Zulaika, 2019) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat desa sudah berperan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Sevtia N. Rindorindo, Linda A. O Tanor, Roy I. J. pangkey, 2021) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat berperan aktif. Penelitian yang dilakukan oleh (Tata Utama, 2021) Hasil penelitian ini menunjukkan Peran perangkat desa telah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir Konseptual

2.3 Hipotesis

Hipotesis menurut (Sugiyono, 2019) adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan di dasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan hubungan antara variabel dalam kerangka pemikiran, maka dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) Pada Desa di Kecamatan Secanggang.

2. Transparansi Berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Pada Desa di Kecamatan Secanggang.
3. Peran perangkat desa berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada desa di Kecamatan secanggang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Asosiatif dengan pendekatan Kuantitatif. Menurut Juliandi et al (2014) menyatakan bahwa penelitian asosiatif adalah penelitian yang ingin melihat apakah suatu variabel bebas berpengaruh terhadap variabel lain yang menjadi variabel terikat. Yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Data yang dikumpulkan dalam bentuk Kuantitatif. Menurut Juliandi et al (2014) pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang permasalahannya tidak ditemukan diawal namun permasalahan tersebut akan ditemukan bila peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengamati secara langsung, dan apabila peneliti menemukan permasalahan dilapangan maka permasalahan tersebut akan diteliti hingga menemukan solusi atau jawabannya.

Adapun topik utama yang menjadi variabel terikat adalah Pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), Variabel Bebas yaitu Akuntabilitas,transparansi dan peran perangkat desa.

3.2 Definisi Operasional

Menurut Kerlinger dalam Azwar (2010) definisi operasional merupakan suatu variabel dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan yang perlu untuk mengukur variabel itu. Definisi seperti ini memberikan batasan atau arti suatu variabel dengan merinci hal yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur variabel tersebut. Definisi Operasional adalah suatu definisi mengenai variabel

yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati.

Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang variabel penelitian ini, maka disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
.	Akuntabilitas (X1)	Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi Stakeholder. Hal ini dapat berupa memberikan, menyajikan, melaporkan kegiatan melalui laporan keuangan kepada principal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pertanggungjawaban 	Ordinal
.	Transparansi (X2)	Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka APBDes kepada Masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi. 2. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran. 3. Adanya audit independen dan Efektif. 4. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran. 	Ordinal
.	Peran Perangkat Desa (X3)	Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran perangkat desa dalam proses perancangan, pelaksanaan, pelaporan dan penatausahaan penggunaan anggaran dana desa. 2. Peran perangkat desa untuk pemberian masukan mengenai perubahan RAPBDes pada Kepala desa dan BPD 4. Peran perangkat desa memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa. 5. Peran perangkat desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberian bimbingan 	Ordinal

			kepada masyarakat.	
.	Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Y)	Anggaran Pendapatan dan belanja desa atau sering disebut dengan APBDes yaitu rencana keuangan tahunan desa yang terdiri dari bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. pertanggungjawaban 	Ordinal

3.3 Tempat dan waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian ini dilaksanakan di Kantor desa yang beralamat di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

3.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini di rencanakan dimulai dari bulan Oktober 2023 sampai dengan selesai, dan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.2 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Oktober 2023	November 2023	Desember 2023	Januari 2024	Februari 2024	Maret 2024	April 2024	Mei 2024
1	Pengajuan judul								
2	Penyusunan proposal								
3	Bimbingan Proposal								
4	Seminar proposal								
5	Penyusunan skripsi								
6	Bimbingan skripsi								
7	Sidang meja hijau								

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Dalam Penelitian ini jenis data yang penulis kumpulkan untuk mendukung variabel yang diteliti adalah data kuantitatif, yaitu dengan mempelajari jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan dan berbentuk angka.

3.4.2 Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data yang dimaksud adalah para pengelola APBDes yang ada pada Desa di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

3.5 Teknik Pengambilan Sampel

3.5.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2020) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan (Arikunto, 2013) Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Jadi yang dimaksud populasi adalah individu yang memiliki sifat yang sama walaupun presentase kesamaan itu sedikit, atau dengan kata lain seluruh individu yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari Permasalahan yang ingin diteliti, maka populasi dari penelitian ini yaitu Kecamatan Secanggang tepatnya 10 desa yang ada pada Kecamatan Secanggang.

Tabel 3.3 Tempat Penelitian

No	Nama Desa
1	Telaga jernih
2	Kebun kelapa
3	Sungai Ular
4	Secanggih
5	Cinta Raja
6	Karang Anyar
7	Suka Mulia
8	Teluk
9	Pantai Gading
10	Karang Gading

3.5.2 Sampel

Menurut (Sugiyono, 2017) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti. Sehingga sampel merupakan Sebagian dari keseluruhan obyek yang akan diteliti atau dievaluasi yang memiliki karakteristik tertentu dari sebuah populasi. Sampel dari penelitian ini yaitu 10 desa yang masing-masing menggunakan 4 orang responden dengan total 40 responden. Adapun kriteria dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kaur atau Kasi
4. Bendahara

Alasan Pemilihan Responden adalah dikarenakan kepala desa merupakan bagian kesatu pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan dan pengelolaan APBDes, Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes,

Menetapkan PPKD, Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL, Menyetujui RAK Desa dan Menyetujui SPP. Sekretaris desa sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa yang bertugas mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDes, mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan rancangan perubahan APBDes mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDes, Perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDes dan perubahan penjabaran APBDes, mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Sedangkan Kaur dan kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran yang mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran kegiatan, mengendalikan kegiatan, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan. Yang terakhir yaitu bendahara yang mempunyai fungsi kaur keuangan yang bertugas menyusun RAK Desa, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Teknik Pengambilan Sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Metode purposive sampling digunakan karena penentuan kriteria responden pihak yang berhubungan secara langsung dengan pengelolaan keuangan desa antara lain adalah kepala desa, Sekretaris desa, Kaur(kasi) dan Bendahara Desa.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Menurut (Komariah.,2011) pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan menurut (Ridwan,2010) metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa teknik pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survey untuk mendapatkan data primer yaitu dengan cara :

1. Wawancara (Interview), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dengan pihak-pihak terkait dan berkompeten dengan permasalahan yang penulis teliti.
2. Kuesioner, yang mana peneliti membuat daftar pernyataan dalam bentuk kuesioner. Penyebaran dan pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada seluruh responden dengan teknik survey mandiri yaitu metode pengumpulan data primer., dalam hal ini responden diminta untuk mengisi jawaban sendiri pada kuesioner yang diberikan. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner adalah teknik penelitian dengan menyebarkan angket, sehingga dalam waktu relative singkat dapat menjangkau banyak responden. Kuesioner digunakan untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Transparansi

dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa di Kecamatan Secanggang.

Setelah Mengumpulkan data, tahap selanjutnya yaitu penentuan skor. Hal ini dilakukan karena teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yaitu peneliti memberikan pertanyaan kepada responden dengan menetapkan skor pada masing-masing jawaban. Skala yang digunakan dalam penentuan skor adalah skala ordinal. Pada skala ordinal pilihan jawaban yang tersedia adalah SB(Sangat Baik), B (Baik), CB (Cukup Baik), TB (Tidak Baik), STB (Sangat Tidak Baik) yang masing-masing diberikan skor sebagai Berikut :

Tabel 3.4 Skor Skala Ordinal

Pertanyaan Jawaban	Skor
SB (Sangat Baik)	5
B (Baik)	4
CB (Cukup Baik)	3
TB (Tidak Baik)	2
STB (Sangat Tidak Baik)	1

3.7 Uji Instrument Data

Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang baik, maka kuesioner yang dijadikan sebagai alat pengumpulan data dalam suatu penelitian harus dilakukan uji validitas dan reliabilitanya terlebih dahulu agar kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tidak keliru.

3.7.1 Uji validitas

Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari suatu instrument, artinya bahwa yang dipakai benar-benar mengukur apa yang

seharusnya diukur. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument (Arikunto,2006).

Suatu Instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan valid atau tidak, caranya r yang diperoleh (r hitung) dibandingkan dengan (r tabel). Instrumen valid apabila r hitung $>$ r tabel jika r hitung $<$ r tabel, maka instrument tidak valid Uji

Reliabilitas

Selain valid (sah) sebuah instrument juga harus reliable (dapat dipercaya), maksudnya bahwa instrument selain harus sesuai dengan kenyataan juga harus memiliki nilai ketepatan. Dimana apabila instrument ini diberikan pada kelompok yang sama dengan waktu yang berbeda akan sama hasilnya.

Tabel 3.5 Uji Validitas

Variabel	Indikator	Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	Perencanaan	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	0,821	0,361	Valid
		Laporan keuangan yang disajikan telah memuat dan mengungkapkan informasi yang cukup memadai.	0,411		Valid
	Pelaksanaan	Pemerintah desa telah mengikuti prosedur pelaksanaan pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan desa sesuai dengan jumlah yang ditentukan	0,555		Valid

		Penyusunan Laporan pertanggungjawaban memuat realisasi pendapatan, belanja desa dan pembiayaan desa secara lengkap	0,484		Valid
	Pertanggung Jawaban	Pemerintah desa tepat waktu dalam menyusun laporan keuangan desa	0,751		Valid
		Pemerintah desa tepat waktu dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa	0,161		Tidak Valid
		Informasi anggaran dana desa bisa diakses atau dilihat diwebsite desa.	0,412		Valid
Transparansi (X2)	Ada tidaknya kerangka hukum bagi transparansi	Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur transparansi.	0,902	0,361	Valid
		Adanya Kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan pertanggungjawaban bagi semua aspek kunci di manajemen fiscal.	0,391		Valid
	Adanya akses masyarakat terhadap Transparansi anggaran	Adanya keterbukaan dalam rangka anggaran (Proses penganggaran).	0,452		Valid
		Dipublikasikan hasil laporan anggaran yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang	0,01		TidakValid
	Adanya Audit independen dan efektif	Adanya lembaga audit yang independen dan efektif	0,37		Valid
		Adanya system peringatan diri (early warning system) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.	0,795		Valid
	Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran	Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran	0,846		Valid

		Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran	0,281		TidakValid
Peran Perangkat Desa (X3)	Peran perangkat desa dalam proses perancangan, pelaksanaan, pelaporan dan penatausahaan penggunaan anggaran dana desa	Perangkat desa terkait terlibat dalam proses perencanaan penggunaan dan desa	0,506	0,361	Valid
		Peran perangkat desa untuk pemberian masukan mengenai perubahan RAPBDes pada Kepala desa dan BPD	Perangkat desa terkait memberikan masukan tentang rancangan APBDes kepada Kepala Desa dan BPD		0,429
	Peran perangkat desa memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa	Perangkat desa terkait terlibat dalam proses pelaksanaan penggunaan dana desa	0,767		Valid
		Perangkat desa terkait bersama kasi menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam perdes tentang APBDes	0,802		Valid
			Perangkat desa terkait memberikan masukan tentang perubahan APBDes		0,61
	Peran perangkat desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberian bimbingan kepada masyarakat	Perangkat desa terkait terlibat dalam proses penatausahaan penggunaan dana desa	0,396		Valid
		Perangkat desa terkait memberikan masukan dan melakukan audit partisipatif	0,182		Tidak Valid

Pengelolaan APBDes (Y)	Tahap Perencanaan	Kepala desa menyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu enam tahun. RPJMDes diterapkan paling lambat tiga bulan setelah kades dilantik	0,172	0,361	TidakValid
		Kepala Desa bersama BPD menyusun rencana kerja pembangunan desa (RKDes).	0,555		Valid
		Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) berdasarkan RKPDes	0,551		Valid
		Sekretaris Desa melaporkan rancangan peraturan dan tentang Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) kepada kepala desa	0,023		TidakValid
		Sekretaris Desa menyampaikn rancangan peraturan dana tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada BPD untuk dibahas bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan	0,094		TidakValid
	Tahap Pelaksanaan	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa.	0,361		Valid
		Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah	0,269		TidakValid

		Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa	0,605	Valid
		Laporan pertanggungjawaban disampaikan ke Kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	0,334	TidakValid
	Tahap Penatausahaan	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara rutin	0,586	Valid
		Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	0,686	Valid
	Tahap Pelaporan	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kepada Bupati/Wali kota berupa laporan semester pertama yaitu laporan realisasi APBDes dan Laporan semester akhir yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun sebelumnya	0,399	Valid
		Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes	0,236	TidakValid
		Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya	- 0,259	TidakValid

		Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kepada Bupati atau Walikota melalui pihak kecamatan setiap akhir tahun	0,362	Valid
	Tahap pertanggungjawaban	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan, sementara laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya	0,217	TidakValid
		Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes di informasikan kepada masyarakat seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi	0,368	Valid

Sumber: SPSS, 2024

Berdasarkan Data diatas memiliki nilai r tabel sebesar 0,3610. Pada Variabel akuntabilitas terdapat 1 pertanyaan yang tidak valid dengan nilai 0,161, Pada Variabel Transaksi sebanyak 2 pertanyaan, dan variabel peran perangkat desa 1 pertanyaan, dan variabel Pengelolaan APBes sebagai variabel sebanyak 8 pertanyaan.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrument adalah alat untuk menguji tingkat konsistensi atau kehandalan dari instrument untuk digunakan sebagai alat pengumpul data

(Arikunto,2006). Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius atau mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang reliable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Reliabilitas suatu alat ukur secara kuantitatif dinyatakan dengan koefisien reliabilitas. Karena semua skala yang digunakan menyediakan enam alternative jawaban maka teknik statistic yang tepat untuk menguji reliabilitas skala berdasarkan konsistensi internal dari skala adalah teknik Cronbach Alpha ().

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat uur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Notostmodjo,2012). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha.

Disini N sama dengan jumlah item, c adalah rata – rata kovarian antar item diantara item dan \bar{v} sama dengan varians rata – rata. Dapat dilihat dari rumus ini bahwa jika anda menambah jumlah item, anda meningkatkan alfa cronbach. Selain itu, jika rata – rata korelasi antar item rendah, maka alfa juga akan rendah. Ketika rata – rata korelasi antar item meningkat (dengan menjaga jumlah item tetap konstan).

Tabel 3.6 Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1.	Akuntabilitas (X1)	0.709	Reliabel
2.	Transparansi (X2)	0,710	Reliabel
3.	Peran Perangkat Desa (X3)	0.718	Reliabel
4.	Pengelolaan APBDes (Y)	0.751	Reliabel

Sumber : SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa seluruh pengujian variabel didapat nilai *Cronbach Alpha* > 0,70. Variabel (Y) memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0.751, variabel (X1) memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0.709, dan variabel (X2) memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0.710, dan variabel (X3) memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0.718. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, indikator yang digunakan setiap variabel dependen dan independen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat ukur variabel. Artinya, pada penelitian ini dapat dilanjutkan karena hasil pengujian ini valid dan reliabel. Jika penelitian ini tidak valid dan reliabel, maka indikator tersebut tidak dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Teknik analisis data digunakan oleh seorang peneliti untuk mengolah data menjadi suatu informasi. Menurut (Sugiyono, 2018) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan laporan dan dokumentasi, dengan cara mengkoordinasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS) menggunakan software SmartPLS versi 3. PLS adalah salah satu metode penyelesaian Struktural Equation Modeling (SEM). SEM memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi pada penelitian yang menghubungkan antara teori dan data, serta mampu melakukan analisis jalur (path) dengan variabel laten

sehingga sering digunakan oleh peneliti yang berfokus pada ilmu sosial. Menurut (Imam Ghozali 2016:417) metode PLS mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator. Penulis menggunakan Partial Least Square karena penelitian ini merupakan variabel laten yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya sehingga penulis dapat menganalisis dengan perhitungan yang jelas dan terperinci.

3.8.1 Analisis outer model (Model Pengukuran)

Menurut Husein(2015:18) Analisis Outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliable). Ada beberapa perhitungan dalam analisis ini

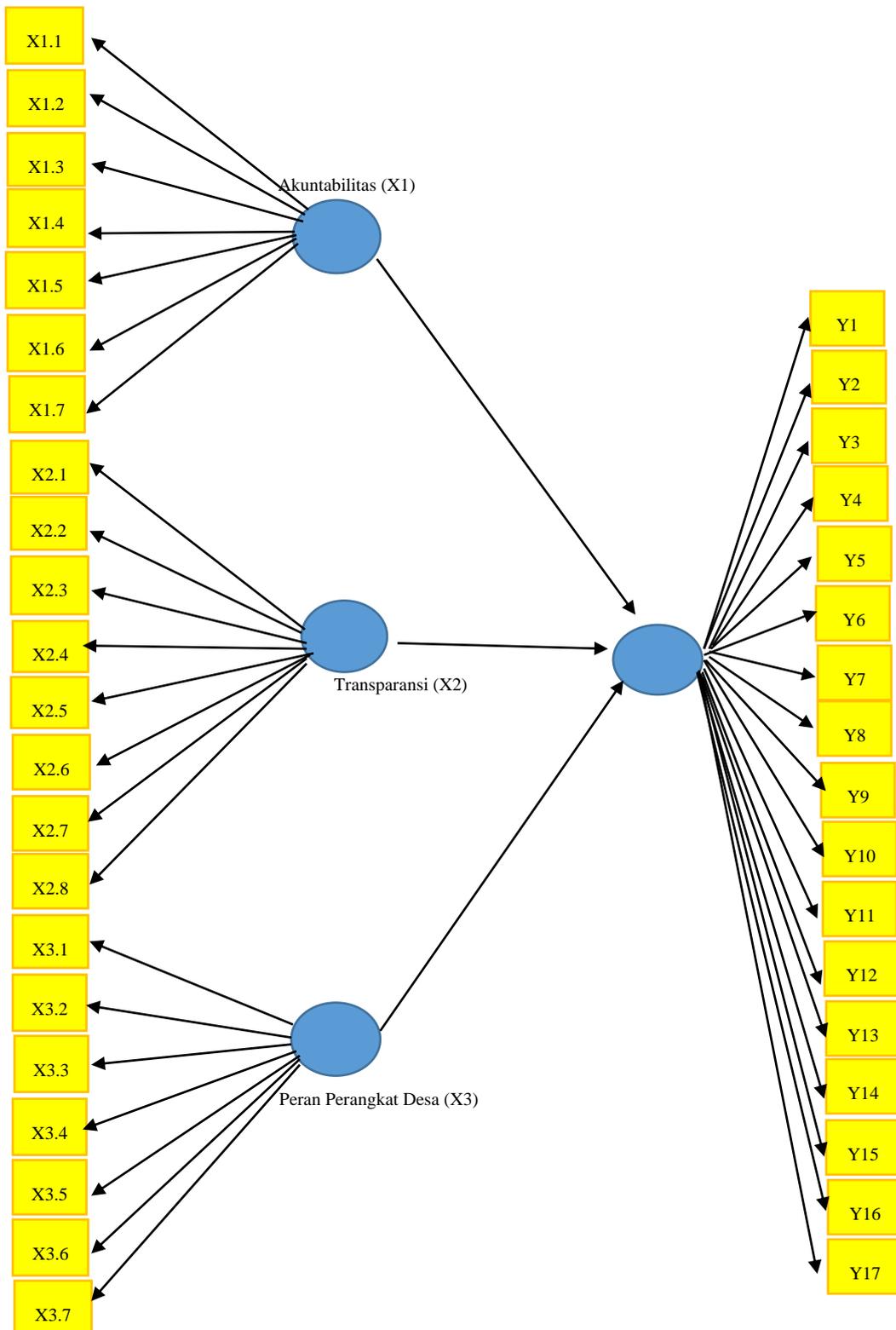
- a. Convergent Validity adalah nilai loading faktor pada variabel laten dengan indikator – indikatornya. Nilai yang diharapkan $>0,7$.
- b. Discriminant validity adalah nilai Crossloading factor yang berguna apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai. Caranya dengan membandingkan nilai konstruk yang di tuju harus lebih besar dengan nilai konstruk lain.
- c. Composite reliability adalah pengukuran apabila nilai reliabilitas $>0,7$ maka nilai konstruk tersebut mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi.
- d. Average Variance Extracted (AVE) adalah rata-rata varian yang setidaknya sebesar 0,5.
- e. Cronbach alpha adalah perhitungan untuk membuktikan hilai composite reliability dimana besaran minimalnya adalah 0,6.

3.8.2 Analisis Inner model (Model Struktural)

Analisis Inner Model atau yang biasa disebut dengan Model Struktural ini digunakan untuk memprediksi hubungan kausal antar variabel yang diuji dalam model. Analisa Inner Model dapat dilihat dari beberapa indikator yang meliputi :

1. Koefisien Determinasi (R^2)
2. Predictive Relevance (Q^2)

R -square pada model PLS dapat dievaluasi dengan melihat Q - square (Predictive Relevance) untuk model variabel. Q -square mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q -square lebih besar dari 0 (nol) akan memperlihatkan bahwa model mempunyai nilai Predictive Relevance, sedangkan apabila nilai Q -square kurang dari 0 (nol) akan memperlihatkan bahwa model kurang memiliki Predictive Relevance. Namun, jika hasil perhitungan memperlihatkan nilai Q -square lebih dari 0 (nol), maka model layak dikatakan memiliki nilai prediktif yang relevan. Apabila nilai yang didapatkan 0,02 (kecil), 0,15(sedang) dan 0,35(besar).



Gambar 3.1 Model Persamaan Struktural

3.9 Uji Hipotesis

Secara umum metode explanatory research merupakan pendekatan metode yang menggunakan PLS. Hal ini disebabkan pada metode ini terdapat pengujian hipotesa. Menguji hipotesis dapat dilihat melalui nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t- statistik yang digunakan adalah 1,96 (Muniarti et al., 2013). Sehingga kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah H_a diterima dan H_0 ditolak jika t-statistik $> 1,96$. Untuk menolak/menerima Hipotesis menggunakan probabilitas maka H_a diterima jika nilai $p < 0,05$.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

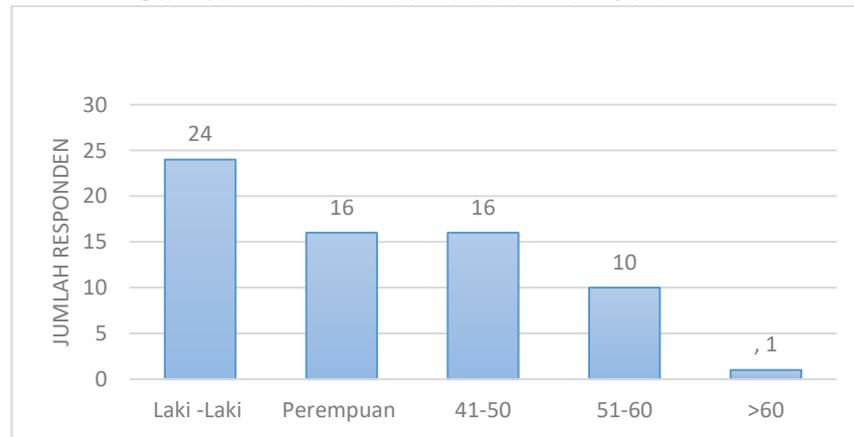
4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran umum Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Secanggang. Kecamatan secanggang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Langkat dengan luas wilayah sekitar 231,19 km² . Secara astronomis Kecamatan Secanggang terletak pada 3°46,17' LU- 03°57,30' LU dan antara 98°27,45' BT-98°39,40' BT. Secara geografis Kecamatan Secanggang berbatasan dengan sebelah utara Selat Malaka, sebelah timur Kabupaten Deli Serdang, sebelah selatan Kecamatan Stabat dan sebelah barat Kecamatan Hinai/Kec. Tanjung Pura. Kecamatan Secanggang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Langkat yang terletak di sebelah barat Kabupaten Langkat. Kecamatan Secanggang memiliki 10 desa dan 1 kelurahan. Suku Melayu dan Suku Banjar hampir merupakan keseluruhan penduduk kecamatan ini atau sekitar 95%, disusul suku lain, yakni Jawa, Batak dan lain-lain. Sebagian besar penduduk berkerja sebagai petani.

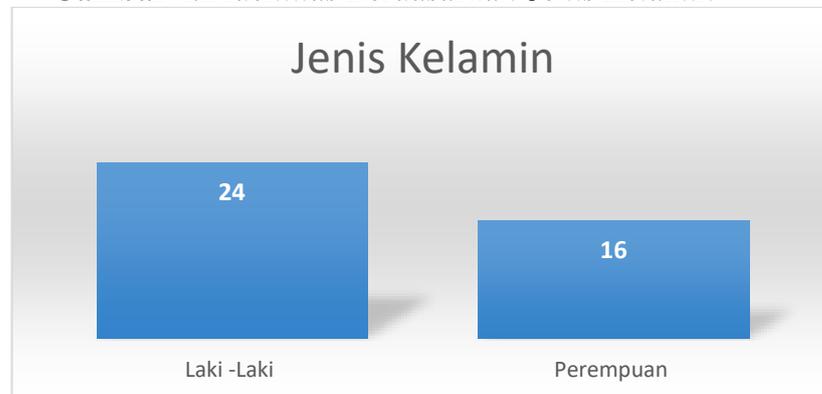
4.1.2 Identitas Responden

Penelitian ini menggunakan 40 responden yang terdiri dari Kepala desa, Sekertaris desa, Kaur atau Kasi Desa, dan bendahara desa dari masing- Masing desa yang ada di kecamatan secanggang. Berikut ada identitas responden berdasarkan usia:

Gambar 4.1 Identitas Berdasarkan Usia

Sumber : data diolah, 2024

Berdasarkan data diatas dapat dilihat dari 40 sampel yang diambil penelitian ini di dominasi oleh responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 16 responden dan 41-50 tahun sebanyak 16 responden. Selain itu pada usia 51-60 tahun sebanyak 10 reponden, 21-30 tahun sebanyak 7 responden, dan hanya ada 1 reponden yang berusia > 60 Tahun.

Gambar 4.2 Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : data diolah, 2024

Penelitian ini memiliki jumlah responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada responde yang berjenis kelamin perempuan. Responden yang berjenis kelamin laki laki sebanyak 24 responden dan perempuan sebanyak 16 Responden.

4.1.3 Deskripsi Data

Hasil pengolahan data dengan uji frekuensi tersebut telah dilakukan peneliti dengan menggunakan bantuan program Statistical Program and Service Solutionseri 20.0, dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:

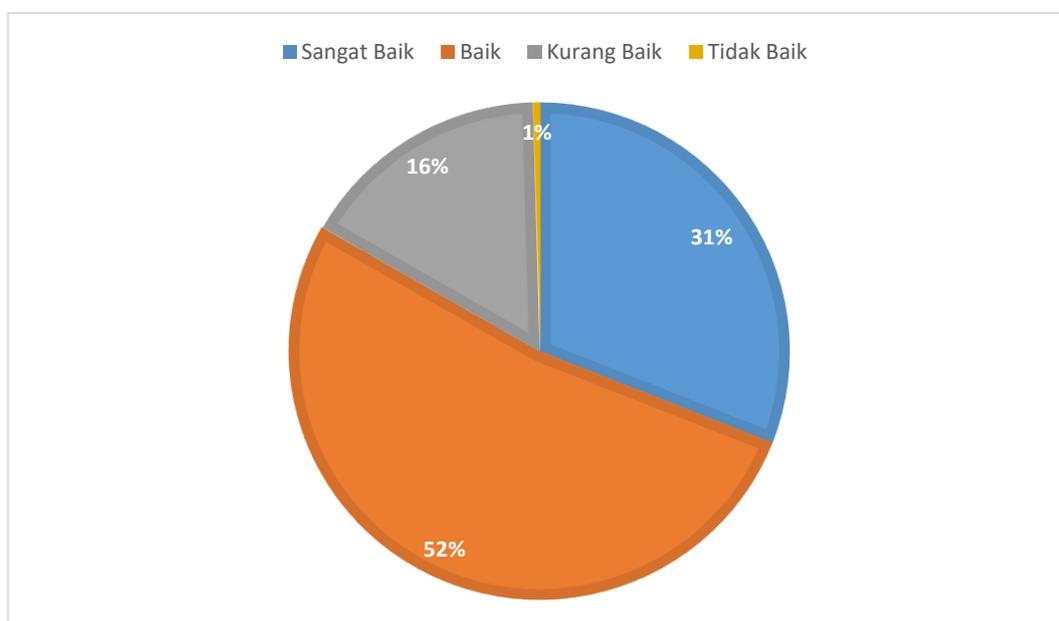
Tabel 4.1 Deskripsi Data Variabel Akuntabilitas (X1)

No	Pernyataan	Tanggapan					Total F	Total Skor	Rata-rata skor	Kategori	
		F	SB	B	CB	TB					STB
1	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	F	17	18	5	0	0	40	172	4,3	Sangat Baik
		%	43	45	13	0	0				
		Skor	85	72	15	0	0				
2	Laporan keuangan yang disajikan telah memuat dan mengungkapkan informasi yang cukup memadai.	F	11	29	0	0	0	40	171	4,3	Sangat Baik
		%	28	73	0	0	0				
		Skor	55	116	0	0	0				
3	Pemerintah desa telah mengikuti prosedur pelaksanaan pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan desa sesuai dengan jumlah yang ditentukan	F	11	15	14	0	0	40	157	3,9	Baik
		%	28	38	35	0	0				
		Skor	55	60	42	0	0				
4	Penyusunan Laporan pertanggungjawaban memuat realisasi pendapatan, belanja desa dan pembiayaan desa secara lengkap	F	12	24	4	0	0	40	168	4,2	Sangat Baik
		%	30	60	10	0	0				
		Skor	60	96	12	0	0				
5	Pemerintah desa tepat waktu dalam menyusun laporan keuangan desa	F	13	20	7	0	0	40	166	4,2	Sangat Baik
		%	33	50	18	0	0				
		Skor	65	80	21	0	0				
6	Pemerintah desa	F	14	24	2	0	0	40	4,3	Sangat	

	tepat waktu dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa	%	35	60	5	0	0				Baik
		Skor	70	96	6	0	0		172		
7	Informasi anggaran dana desa bisa diakses atau dilihat diwebsite desa.	F	10	16	13	1	0	40		3,9	Baik
		%	25	40	33	3	0				
		Skor	50	64	39	2	0		155		

Sumber: SPSS, 2024

Berdasarkan dari data pada tabel diatas adalah hasil dari uji frekuensi data jawaban kuesioner responden yang berkaitan tentang variabel Akuntabilitas (X1), bahwa pernyataan yang paling dominan direspon oleh responden setuju dan sangat setuju dengan jumlah 40 responden adalah pertanyaan no 2, menjawab setuju sebanyak 29 responden atau 72,5%, yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 11 responden atau 27,5. Tampilan grafik pada hasil deskriptif data pada variabel Akuntabilitas dapat dilihat di bawah ini:



Grafik 4. 1 Diagram Deskriptif Akuntabilitas (X1)

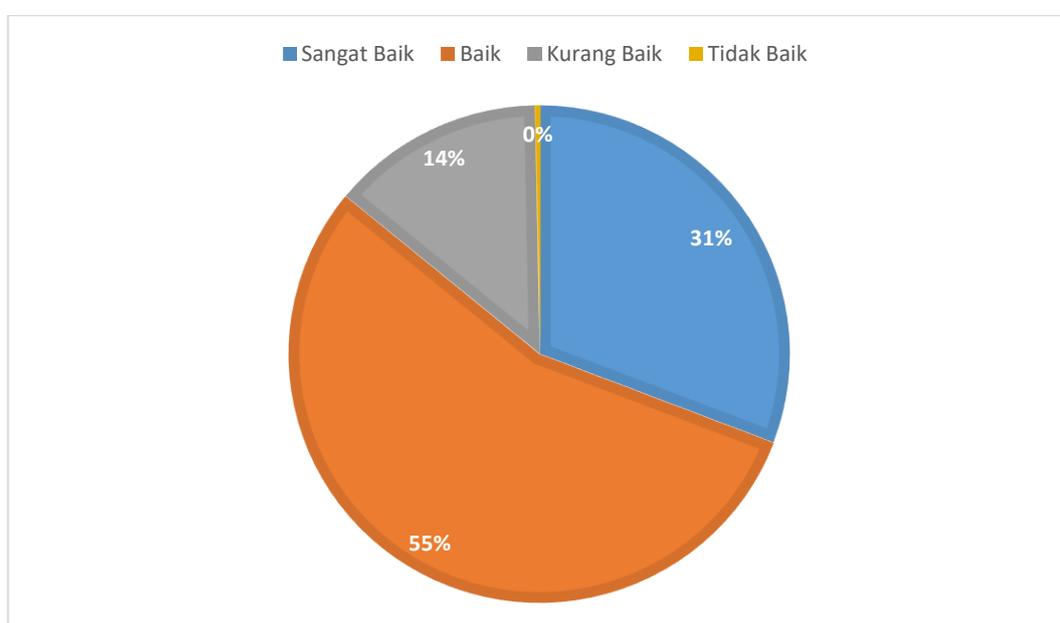
Berdasarkan penyebaran angket kepada responden diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang variabel Transaksi (X2) sebagai berikut:

Tabel 4.2 Deskripsi Data Variabe Transparansi (X2)

No	Pernyataan	Tanggapan						Total F	Total Skor	Rata-rata skor	Kategori
			SB	B	CB	TB	STB				
1	Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur transparansi.	F	13	20	7	0	0	40		4,15	Baik
		%	32,5	50	17,5	0	0				
		Skor	65	80	21	0	0		166		
2	Adanya Kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan pertanggungjawaban bagi semua aspek kunci di manajemen fiscal.	F	9	29	2	0	0	40		4,18	Baik
		%	22,5	72,5	5	0	0				
		Skor	45	116	6	0	0		167		
3	Adanya keterbukaan dalam rangka anggaran (Proses penganggaran).	F	14	24	2	0	0	40		4,3	Sangat Baik
		%	35	60	5	0	0				
		Skor	70	96	6	0	0		172		
4	Dipublikasikan hasil laporan anggaran yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang	F	5	28	7	0	0	40		3,95	Baik
		%	12,5	70	17,5	0	0				
		Skor	25	112	21	0	0		158		
5	Adanya lembaga audit yang independen dan efektif	F	11	29	0	0	0	40		4,28	Sangat Baik
		%	27,5	72,5	0	0	0				
		Skor	55	116	0	0	0		171		
6	Adanya system peringatan diri (early warning system) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.	F	17	18	5	0	0	40		4,3	Sangat Baik
		%	42,5	45	12,5	0	0				
		Skor	85	72	15	0	0		172		
7	Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran	F	20	13	7	0	0	40		4,3	Sangat Baik
		%	50	32,5	17,5	0	0				
		Skor							172		
8	Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran	F	10	16	13	1	0	40		3,89	Baik
		%	25	40	35,5	2,5	0				
		Skor	50	64	39	2	0		155		

Sumber: SPSS, 2024

Berdasarkan dari data pada tabel diatas adalah hasil dari uji frekuensi data jawaban kuesioner responden yang berkaitan tentang variabel Transaksi (X2), bahwa pernyataan yang paling dominan direspon oleh responden setuju dan sangat setuju dengan jumlah 40 responden adalah pertanyaan no 5, menjawab setuju sebanyak 29 responden atau 72,5%, yang menyatakan Sangat Setuju sebanyak 11 responden atau 27,5. Tampilan grafik pada hasil deskriptif data pada variabel Transaksi dapat dilihat di bawah ini



Grafik 4. 2 Diagram Deskriptif Variabel Transaksi

Berdasarkan penyebaran angket kepada responden diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang Peran Perangkat Desa (X3) sebagai berikut:

Tabel 4.3 Deskripsi Data Variabe Peran Perangkat Desa (X3)

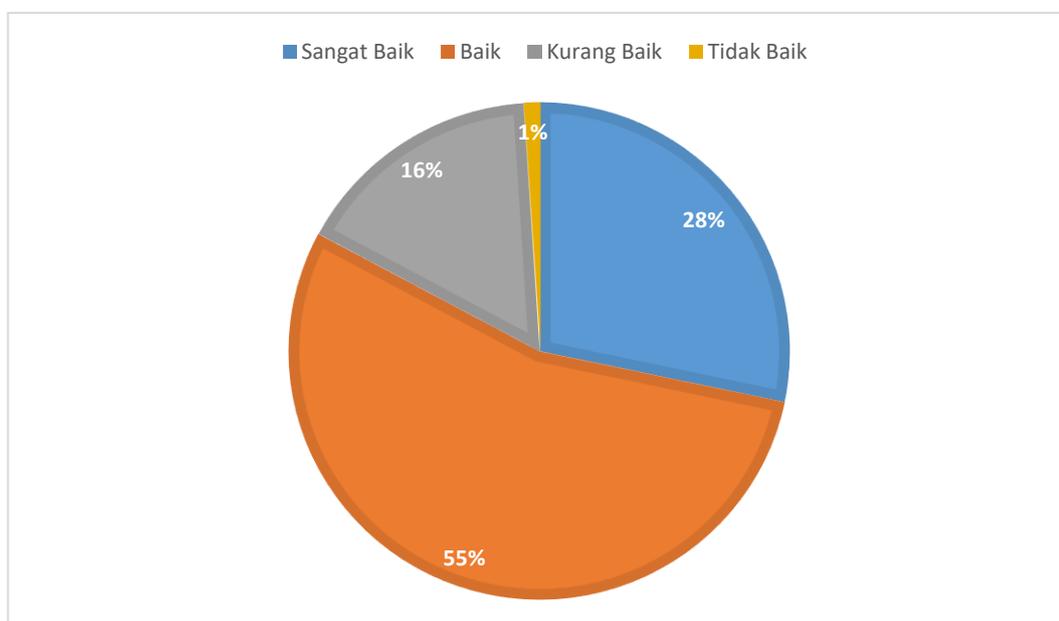
No	Pernyataan	Tanggapan					Total F	Total Skor	Rata-rata skor	Kategori
		SB	B	CB	TB	STB				
1	Perangkat desa terkait	F	11	15	14	0	0	40	3,93	Baik
		%	27,5	37,5	35	0	0			

	terlibat dalam proses perencanaan penggunaan dan desa	Skor	55	60	42	0	0		157		
2	Perangkat desa terkait memberikan masukan tentang rancangan APBDes kepada Kepala Desa dan BPD	F	10	16	13	1	0	40		3,3	Cukup Baik
		%	25	40	32,5	2,5	0				
		Skor	50	64	39	3	0		132		
3	Perangkat desa terkait terlibat dalam proses pelaksanaan penggunaan dana desa	F	19	14	7	0	0	40		4,3	Sangat Baik
		%	47,5	35	17,5	0	0				
		Skor	95	56	21	0	0		172		
4	Perangkat desa terkait bersama kasi menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam perdes tentang APBDes	F	13	20	7	0	0	40		4,15	Baik
		%	32,5	50	17,5	0	0				
		Skor	65	80	21	0	0		166		
5	Perangkat desa terkait memberikan masukan tentang perubahan APBDes	F	11	26	3	0	0	40		4,2	Baik
		%	27,5	65	7,5	0	0				
		Skor	55	104	9	0	0		168		
6	Perangkat desa terkait terlibat dalam proses penatausahaan	F	11	29	0	0	0	40		4,3	Sangat Baik
		%	17,5	72,5	0	0	0				
		Skor	55	116	0	0	0		171		

	penggunaan dana desa										
7	Perangkat desa terkait memberikan masukan dan melakukan audit partisipatif	F	7	31	2	0	0	40	4,13	Baik	
		%	17,5	77,5	5	0	0				
		Skor	35	124	6	0	0	165			

Sumber : SPSS, 2024

Berdasarkan dari data pada tabel diatas adalah hasil dari uji frekuensi data jawaban kuesioner responden yang berkaitan tentang variabel Peran Perangkat Desa (X3), bahwa pernyataan yang paling bervariasi direspon oleh responden dengan jumlah 40 responden adalah pertanyaan no2, menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden atau 2.5%, yang menyatakan netral sebanyak 13 responden atau 32.5, yang menjawab setuju sebanyak 16 responden dengan persentase sebesar 40% dan terakhir yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 responden atau sebesar 25%.



Grafik 4.3 Diagram Deskriptif Variabel Peran Perangkat Desa

Berdasarkan penyebaran angket kepada responden diperoleh nilai-nilai frekuensi jawaban responden tentang Pengelolaan APBDes (Y) sebagai berikut:

Tabel 4.4 Deskripsi Data Variabel Pengelolaan APBDes (Y)

No	Pertanyaan		SB	B	CB	TB	STB	Total			Kategori
							F	Total F	Total Skor	Rata-rata Skor	
1	Kepala desa menyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu enam tahun. RPJMDes diterapkan paling lambat tiga bulan setelah kades dilantik	F	10	16	13	1	0	40		3,88	Baik
		%	25	40	32,5	2,5	0				
		Skor	50	64	39	2	0		155		
2	Kepala Desa bersama BPD menyusun rencana kerja pembangunan desa (RKDes).	F	13	20	7	0	0	40		4,15	Baik
		%	32,5	50	17,5	0	0				
		Skor	65	80	21	0	0		166		
3	Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) berdasarkan RKPDes	F	5	28	7	0	0	40		3,95	Baik
		%	12,5	70	17,5	0	0				
		Skor	25	112	21	0	0		158		
4	Sekretaris Desa melaporkan rancangan peraturan dan tentang Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) kepada kepala desa	F	4	29	6	1	0	40		3,9	Baik
		%	10	72,5	15	2,5	0				
		Skor	20	116	18	2	0		156		
5	Sekretaris Desa menyampaikn rancangan peraturan dana tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada BPD untuk dibahas bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan	F	9	26	5	0	0	40		4,1	Baik
		%	22,5	65	12,5	0	0				
		Skor	45	104	15	0	0		164		
6	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui	F	11	29	0	0	0	40		4,28	Sangat Baik
		%	27,5	72,5	0	0	0				
		Skor	55	116	0	0	0		171		

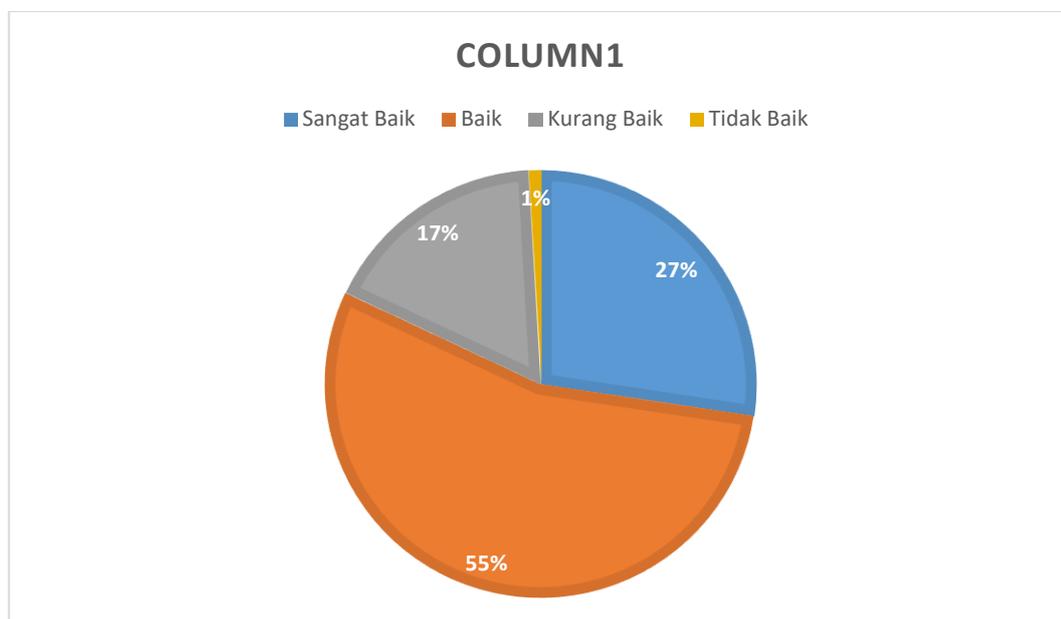
	rekening desa.										
7	Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah	F	27	12	1	0	0	40		4,65	Sangat Baik
		%	67,5	30	2,5	0	0				
		Skor	135	48	3	0	0		186		
8	Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa	F	9	27	4	0	0	40		4,13	Baik
		%	22,5	67,5	10	0	0				
		Skor	45	108	12	0	0		165		
9	Laporan pertanggungjawaban disampaikan ke Kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	F	7	27	6	0	0	40		4,03	Baik
		%	17,5	67,5	15	0	0				
		Skor	35	108	18	0	0		161		
10	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara rutin	F	17	18	5	0	0	40		4,3	Sangat Baik
		%	42,5	45	12,5	0	0				
		Skor	85	72	15	0	0		172		
11	Bendahra desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	F	11	15	14	0	0	40		3,93	Baik
		%	27,5	37,5	35	0	0				
		Skor	55	60	42	0	0		157		
12	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kepada Bupati/Wali kota berupa laporan semester pertama yaitu laporan realisasi APBDes dan Laporan semester akhir yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun sebelumnya	F	19	13	7	1	0	40		4,25	Sangat Baik
		%	47,5	32,5	17,5	2,5	0				
		Skor	95	52	21	2	0		170		
13	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes	F	11	13	16	0	0	40		3,88	Baik
		%	27,5	32,5	40	0	0				
		Skor	55	52	48	0	0		155		
14	Laporan semester akhir tahun	F	14	24	2	0	0	40		4,3	Sangat Baik
		%	35	60	5	0	0				

	disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya	Skor	70	96	6	0	0		172		
15	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kepada Bupati atau Walikota melalui pihak kecamatan setiap akhir tahun	F	7	16	17	0	0	40		3,75	Baik
		%	17,5	40	42,5	0	0				
		Skor	35	48	51	0	0		150		
16	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan, sementara laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya	F	7	26	2	3	0	40		3,78	Baik
		%	17,5	70	5	7,5	0				
		Skor	35	104	6	6	0		151		
17	Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes di informasikan kepada masyarakat seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi	F	5	31	4	0	0	40		4,03	Baik
		%	12,5	77,5	10	0	0				
		Skor	25	124	12	0	0		161		

Sumber : SPSS, 2024

Berdasarkan dari data pada tabel diatas adalah hasil dari uji frekuensi data jawaban kuesioner responden yang berkaitan tentang variabel Peran Perangkat Desa (X3), bahwa pernyataan yang paling bervariasi direspon oleh responden dengan jumlah 40 responden adalah pertanyaan no16, menjawab tidak setuju sebanyak 3 responden atau 7.5%, yang menyatakan netral sebanyak 2 responden atau 5, yang menjawab setuju sebanyak 26 responden dengan persentase sebesar

70% dan terakhir yang menjawab sangat setuju sebanyak 5 responden atau sebesar 12.5%.



Grafik 4. 4 Diagram Deskriptif Variabel Pengelolaan APBDes (Y)

4.1.4 Hasil Analisis Data

Evaluasi terhadap model yang indikatornya bersifat reflektif meliputi pemeriksaan sebagai berikut: (1) *discriminant validity*, (2) *internal consistency* atau *construct reliability*, (3) *average variance extracted*, dan yang akan diuraikan di bawah ini yaitu sebagai berikut:

a. *Convergent Validity*

Discriminant Validity menggunakan nilai *cross loading*. Nilai *cross loading* masing-masing konstruk dievaluasi untuk memastikan bahwa korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada konstruk lainnya. Nilai *cross loading* yang diharapkan adalah lebih besar dari 0,7 (Ghozali dan Latan, 2015). Hasil analisis *discriminant validity* disajikan pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.5 Cross Loading

	X1	X2	X3	Y
X1.P1	0.925	0.934	0.870	0.904
X1.P2	0.764	0.776	0.758	0.799
X1.P3	0.783	0.782	0.743	0.794
X1.P4	0.783	0.782	0.743	0.794
X1.P5	0.913	0.971	0.941	0.914
X1.P6	0.883	0.852	0.803	0.884
X2.P1	0.913	0.971	0.941	0.914
X2.P2	0.925	0.934	0.870	0.904
X2.P3	0.764	0.776	0.758	0.799
X2.P5	0.783	0.782	0.743	0.794
X2.P6	0.925	0.934	0.870	0.904
X2.P7	0.725	0.910	0.810	0.789
X3.P1	0.783	0.782	0.743	0.794
X3.P2	0.813	0.871	0.741	0.714
X3.P3	0.755	0.917	0.842	0.722
X3.P4	0.913	0.971	0.941	0.914
X3.P5	0.773	0.762	0.743	0.794
X3.P6	0.764	0.776	0.758	0.733
Y.P2	0.913	0.971	0.941	0.914
Y.P3	0.713	0.743	0.745	0.734
Y.P6	0.764	0.776	0.758	0.733
Y.P8	0.862	0.785	0.708	0.830
Y.P10	0.925	0.934	0.870	0.904
Y.P11	0.783	0.782	0.743	0.794
Y.P12	0.759	0.768	0.730	0.845
Y.P15	0.864	0.786	0.778	0.833
Y.P17	0.953	0.871	0.841	0.714

Sumber: Data Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0

Dari table diatas dapat dilihat bahwa semua loading indicator terhadap konstruk $> 0,7$. Oleh karena ini dapat disimpulkan bahwa model ini telah memenuhi syarat *Discriminant Validity*. Dari hasil analisis data cross-loading yang telah dilakukan pada penelitian mengenai pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan APBDes, dapat dilihat bahwa setiap variabel indikator memiliki nilai loading yang signifikan terhadap konstruk yang sesuai. Untuk

variabel Akuntabilitas (X1), nilai loading terendah ditemukan pada pertanyaan X1.P2 (0.764), sementara nilai loading tertinggi diperoleh dari pertanyaan X1.P1 (0.925), menunjukkan bahwa indikator yang berhubungan dengan perencanaan memiliki kontribusi yang paling signifikan terhadap konstruk Akuntabilitas. Sementara itu, untuk variabel Transparansi (X2), pertanyaan X2.P7 (0.725) menunjukkan nilai loading terendah, sedangkan pertanyaan X2.P2 (0.925) memiliki nilai loading tertinggi, menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan APBDes. Variabel Peran Perangkat Desa (X3) menunjukkan nilai loading terendah pada pertanyaan X3.P2 (0.713), sedangkan nilai loading tertinggi ditemukan pada pertanyaan X3.P4 (0.913), menggambarkan pentingnya peran perangkat desa dalam pengelolaan APBDes. Sementara untuk variabel Pengelolaan APBDes (Y), pertanyaan Y.P3 (0.743) memiliki nilai loading terendah, sementara pertanyaan Y.P17 (0.953) memiliki nilai loading tertinggi, menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap efektivitas pengelolaan APBDes.

b. *Composite Validity*

Composite reliability digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur suatu konsep atau mengukur konsistensi dalam menjawab item pernyataan dalam kuesioner atau instrumen penelitian. *Composite reliability* yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi melalui *cronbach's alpha* (Ghozali & Latan, 2015). Suatu konstruk dinyatakan reliabel jika nilai *composite reliability* melalui *cronbach's alpha* dengan ketentuan penilaian > 0.7 . Hasil analisis *Composite Validity* disajikan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.6 Composite Reliability

No.	Variabel	Nilai Reabilitas Komposit	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
1.	Akuntabilitas (X1)	0.867	0.841	Reliabel
2.	Transparansi (X2)	0.953	0.933	Reliabel
3.	Peran Perangkat Desa (X3)	0.833	0.809	Reliabel
4.	Pengelolaan APBDes (Y)	0.893	0.877	Reliabel

Sumber: Data Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0

Berdasarkan hasil uji *composite reability* menunjukkan nilai reabilitas komposit variabel Akuntabilitas (X1) sebesar 0,867, variabel Transparansi (X2) 0,953, variabel Petan perangkat Desa (x3) 0,833, dan variabel Pengelolaan APBDes memiliki nilai 0,893 serta nilai *cronbach's alpha* pada variabel Akuntabilitas (X1) sebesar 0,841, variabel Transparansi (X2) 0,933, variabel Petan perangkat Desa (x3) 0,809, dan variabel Pengelolaan APBDes memiliki nilai 0,877. Maka dapat disimpulkan dalam uji *composite reability* seluruh nilai *cronbach's alpha* > 0,70 sehingga dapat dikatakan dalam penelitian ini semua variabel yang diteliti dinyatakan reliabel dan telah memenuhi syarat untuk digunakan dalam pengujian selanjutnya.

c. Avarage Extracted (AVE)

Validitas konvergen sebuah konstruk dengan indikator reflektif dievaluasi dengan Average Variance Extracted (AVE). Nilai AVE seharusnya sama dengan 0,5 atau lebih. Nilai AVE 0,5 atau lebih berarti konstruk dapat menjelaskan 50% atau lebih varians itemnya (Wong K.K., 2013, Sarstedt dkk., 2017). nilai *Average Variance Extracted (AVE)* untuk mengetahui tercapainya syarat validitas konvergen, maka semua konstruk telah tercapai syarat validitas konvergen sebab nilai AVE semuanya >0,50. .

Hasil analisis *Average Variance Extracted (AVE)* disajikan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.7 Average Variance Extracted (AVE)

No.	Variabel	AVE
1.	Akuntabilitas (X1)	0.686
2.	Transparansi (X2)	0.881
3.	Peran Perangkat Desa (X3)	0.645
4.	Pengelolaan APBDes (Y)	0.680

Sumber: Data Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0

Berdasarkan hasil Avarage Extracted (AVE) pada masing-masing variabel yaitu variabel Akuntabilitas (X1) sebesar $0,686 > 0,50$, variabel Transparansi (X2) $0,881 > 0,50$, variabel Petan perangkat Desa (x3) $0,645 > 0,50$, dan variabel Pengelolaan APBDes memiliki nilai $0,680 > 0,50$

4.1.1 Inner Model (Model Struktural)

Evaluasi selanjutnya dalam structural model adalah menilai *coefficient of determination* atau biasa juga disebut dengan mengevaluasi *R square* (R^2). Interpretasi nilai R^2 yaitu besarnya *variability* variabel endogen yang mampu dijelaskan oleh variabel eksogen. Menurut (Chin, 1998) kriteria R^2 terdiri dari tiga klasifikasi yaitu nilai R^2 0.67 dikategorikan substansial, 0.33 dikategorikan sedang (moderat) dan nilai R^2 sebesar 0.19 dikategorikan lemah. Hasil *coefficient of determination* (R^2) dilaporkan pada Tabel di bawah ini

Tabel 4.8 Model Stuktural atau Inner Model (R-Square)

	R Square	Adjusted R Square
Pengelolaan APBDes (Y)	0,980	0,978

Sumber: Data Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0

Berdasarkan hasil evaluasi *inner model* diketahui bahwa hasil evaluasi *inner model* melalui R-Square pada variabel Y diperoleh nilai sebesar 0,980 maka dapat

dijelaskan bahwa variabel Akuntabilitas, Transparansi, dan peran perangkat desa memberikan pengaruh sebesar 98% terhadap Pengelolaan APBDes.

4.1.2 Uji Hipotesis

Menguji hipotesis dapat dilihat melalui nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t- statistik yang digunakan adalah 1,96 (Muniarti et al., 2013). Sehingga kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah H_a diterima dan H_0 ditolak jika t- statistik $> 1,96$. Untuk menolak/menerima Hipotesis menggunakan probabilitas maka H_a diterima jika nilai $p < 0,05$.

Tabel 4.9 Uji Hipotesis

	Sampel Asli	Rata-rata Sampel	Standar Deviasi	T Statistik	P Values
X1 → Y	2,066	1,176	0,021	8,571	0,000
X2 → Y	3,044	2,059	0,121	3,544	0,004
X3 → Y	0,874	0,122	0,131	2,282	0,015

Sumber: Data Hasil Pengolahan SmartPLS 4.0

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa pada variabel X1 → Y menunjukkan nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar $8,571 > 1,95$ dengan nilai P-Values sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat diketahui bahwa H_1 pada penelitian ini diterima yang berarti Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan APBDes di Kecamatan Secangang. Pada Variabel Transparansi memiliki nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar $3,544 > 1,95$ dengan nilai P-Values sebesar $0,004 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa H_2 pada penelitian ini diterima yang berarti Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes di Kecamatan Secangang. Dan pada variabel Peran Perangkat Desa memiliki nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar $2,282 > 1,95$ dengan nilai P-Values sebesar $0,015 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa H_3

pada penelitian ini juga diterima yang berarti Peran Perangkat Desa berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes di Kecamatan Secangang.

4.2 Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa di Kecamatan Secanggang

Akuntabilitas merujuk pada kemampuan suatu entitas pemerintahan untuk memberikan pertanggungjawaban dan transparansi terhadap pengelolaan dana publik. Ini mencakup aspek penting seperti ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan serta adanya mekanisme pengawasan yang memungkinkan pemantauan oleh pihak eksternal. Di sisi lain, Pengelolaan APBDes melibatkan serangkaian proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap penggunaan dana desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, termasuk alokasi dan penggunaan dana yang efisien dan efektif.

Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif dan signifikan antara tingkat akuntabilitas dan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Secanggang. Temuan ini tidak hanya memberikan pemahaman baru yang mendalam terkait dinamika pengelolaan dana desa, tetapi juga memperkuat temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti yang disoroti oleh teori agensi, akuntabilitas memainkan peran sentral dalam meningkatkan transparansi, pertanggungjawaban, dan efisiensi pengelolaan dana publik (Saragih, 2024). Akuntabilitas yang kuat merupakan landasan yang diperlukan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat.

Dari hasil analisis data, terlihat bahwa nilai loading terendah ditemukan pada pertanyaan X1.P2 (0.764), sementara nilai loading tertinggi diperoleh dari pertanyaan X1.P1 (0.925), menunjukkan bahwa indikator yang berhubungan dengan perencanaan memiliki kontribusi yang paling signifikan terhadap konstruk Akuntabilitas. Pada pernyataan "laporan keuangan yang disajikan telah memuat dan mengungkapkan informasi yang cukup dan memadai" responden memberikan respons yang kurang baik terhadap pertanyaan tersebut. Respons yang kurang baik terhadap pernyataan tentang kecukupan informasi dalam laporan keuangan mungkin disebabkan oleh ketidakjelasan, ketidaktransparan, atau kekurangan informasi yang relevan dalam laporan tersebut. Selain itu, keraguan terhadap akurasi dan keandalan informasi juga dapat mempengaruhi respons negatif. Faktor pengalaman sebelumnya dan kepercayaan terhadap proses penyusunan laporan juga dapat memainkan peran penting dalam respons yang kurang baik ini. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki lebih lanjut penyebab respons yang kurang baik ini untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan dalam laporan keuangan di masa mendatang.

Lebih lanjut, pada pernyataan "semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah" mendapatkan respons yang baik. Respons yang baik terhadap pernyataan tersebut menandakan kepercayaan yang tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini mencerminkan keyakinan bahwa dana desa dikelola dengan efektif dan efisien melalui rekening kas desa, serta didukung oleh bukti yang lengkap dan sah untuk setiap transaksi keuangan.

.Pentingnya akuntabilitas dalam konteks pengelolaan APBDes juga diperkuat oleh temuan studi sebelumnya. (Rosidah et al., 2023) menggarisbawahi konsep akuntabilitas sebagai kerangka kerja yang penting dalam memastikan integritas pengelolaan dana publik. Dalam hal ini, akuntabilitas menjadi dasar yang diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan penggunaan dana publik yang bertanggung jawab. Penelitian oleh (Garrett et al., 2014) juga menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan internal, seperti audit, dalam mendukung akuntabilitas dan kualitas pengelolaan dana publik.

Disisi lain, penelitian sebelumnya juga memberikan dukungan teoritis dan empiris terhadap hubungan antara akuntabilitas dan kualitas pengelolaan dana publik. Studi oleh (Rosidah et al., 2023), misalnya, menyoroti konsep akuntabilitas dalam kerangka kerja teoritis yang komprehensif, menegaskan peran pentingnya dalam memastikan penggunaan dana publik yang bertanggung jawab. Selain itu, (Garrett et al., 2014) menemukan bahwa kualitas audit internal dapat berdampak signifikan pada manajemen laba di sektor kesehatan, menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan internal dalam mendukung akuntabilitas dan integritas pengelolaan dana publik.

Dengan demikian, temuan dari penelitian ini menambahkan bukti empiris yang kuat pada literatur yang ada, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hubungan antara akuntabilitas dan Pengelolaan APBDes di tingkat lokal. Implikasi kebijakan dari penelitian ini dapat meliputi upaya untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan terkait alokasi dana publik. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa di Indonesia.

4.2.2. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Pada Desa Di Kecamatan Secanggang

Transparansi merujuk pada tingkat keterbukaan dan aksesibilitas informasi terkait pengelolaan dana desa, termasuk informasi keuangan, proses pengambilan keputusan, dan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut (Ismail et al., 2016). Di sisi lain, Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mencakup serangkaian proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap penggunaan dana desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, termasuk alokasi dan penggunaan dana yang efisien dan efektif.

Salah satu penjelasan teoritis terkait fenomena ini dapat dikaitkan dengan konsep agensi dan teori keagenan. Teori agensi menekankan pentingnya pemantauan dan pertanggungjawaban dalam mengelola konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana publik, yaitu antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai principal (Pebrianti, 2021). Namun, dalam konteks pengelolaan APBDes, mungkin terdapat faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam memengaruhi kualitas pengelolaan dana desa, seperti kapasitas administrasi, partisipasi masyarakat, atau mekanisme pengawasan yang lebih efektif.

Dengan kata lain, meskipun transparansi adalah prasyarat penting untuk membangun kepercayaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, faktor-faktor lain yang mungkin lebih kuat atau lebih langsung berdampak pada pengelolaan dana desa dapat mengatasi dampak transparansi yang kurang signifikan dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, temuan ini menekankan pentingnya memahami secara komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan dana desa untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBDes di tingkat lokal.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertanyaan X2.P7 (0.725) menunjukkan nilai loading terendah, sedangkan pertanyaan X2.P2 (0.925) memiliki nilai loading tertinggi, menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan APBDes. Pernyataan terkait “Adanya Kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan pertanggungjawaban bagi semua aspek kunci di manajemen fiskal” mendapatkan respon yang baik. Respon yang baik terhadap pernyataan tersebut menandakan bahwa responden menganggap pentingnya adanya kerangka kerja hukum yang jelas dalam menentukan peran dan pertanggungjawaban dalam manajemen fiskal. Ini mencerminkan keyakinan bahwa kerangka kerja hukum yang jelas adalah kunci untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa

Lebih lanjut, pernyataan terkait keterlibatan masyarakat mendapatkan respons kurang baik terhadap pertanyaan tentang kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran, yang dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Faktor penyebab

respons kurang baik dapat meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran mereka dalam proses penganggaran dan kemungkinan adanya hambatan struktural atau kebijakan yang menghalangi partisipasi.

Perbaikan dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam penganggaran serta memperkuat mekanisme partisipasi publik, seperti pertemuan terbuka atau forum dialog antara pemerintah dan masyarakat. Diperlukan komitmen pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat sipil dan memastikan suara mereka didengar dalam pembuatan keputusan anggaran, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Dalam konteks ini, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor lain yang memengaruhi pengelolaan dana desa di Kecamatan Secangang. Salah satu faktor yang mungkin memiliki peran yang lebih dominan adalah kapasitas administrasi, di mana keterbatasan sumber daya manusia atau kurangnya keahlian dalam pengelolaan keuangan publik dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa (Widyatama et al., 2017). Selain itu, partisipasi masyarakat dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif juga dapat menjadi faktor penentu dalam menentukan kualitas pengelolaan APBDes (Tumbel, 2017).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi secara spesifik faktor-faktor apa yang memengaruhi pengelolaan dana desa di Kecamatan Secangang. Pemahaman yang lebih dalam terhadap dinamika ini akan memberikan landasan yang lebih kuat bagi pengembangan kebijakan yang tepat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa dan pelayanan publik di tingkat lokal.

4.2.3. Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa (Apbdes) Pada Desa Di Kecamatan Secanggang

Peran perangkat desa merujuk pada kontribusi dan tanggung jawab yang dimiliki oleh para staf administratif dan pengelola desa dalam mengelola dan menyusun APBDes serta menjalankan fungsi administratif lainnya. Di sisi lain, Pengelolaan APBDes melibatkan serangkaian proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap penggunaan dana desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, termasuk alokasi dan penggunaan dana yang efisien dan efektif.

Namun, hasil pengolahan data menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan APBDes di Kecamatan Secanggang. Temuan ini menarik karena menyoroti kompleksitas dalam faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan dana desa. Meskipun peran perangkat desa secara teoritis dianggap penting dalam proses administratif dan pengelolaan dana desa, temuan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain mungkin memiliki pengaruh yang lebih signifikan.

Berdasarkan analisis data juga terlihat bahwa nilai loading terendah pada pertanyaan X3.P2 (0.713), sedangkan nilai loading tertinggi ditemukan pada pertanyaan X3.P4 (0.913), menggambarkan pentingnya peran perangkat desa dalam pengelolaan APBDes. Pada pernyataan “Perangkat desa terkait bersama kasi menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam perdes tentang APBDes” mendapat respon yang baik. Respon yang baik menunjukkan

pengakuan terhadap pentingnya peran aktif perangkat desa dalam penyusunan RAB, memfasilitasi pengadaan barang dan jasa, serta mengelola atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan Perdes tentang APBDes. Ini mencerminkan keyakinan akan kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana desa dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Lebih lanjut, pada pernyataan “Perangkat desa terkait memberikan masukan tentang rancangan APBDes kepada Kepala Desa dan BPD” responden memberikan respons kurang baik. Respons ini mengindikasikan potensi masalah dalam konsultasi dan partisipasi perangkat desa dalam penyusunan APBDes. Penyebab respons kurang baik mungkin termasuk kurangnya pemahaman perangkat desa tentang pentingnya peran mereka dalam proses anggaran desa dan terbatasnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam konsultasi. Peran perangkat desa penting untuk memastikan representasi kepentingan masyarakat desa dalam alokasi anggaran.

Diperlukan upaya meningkatkan pemahaman perangkat desa tentang peran mereka dalam proses anggaran desa serta memastikan tersedianya mekanisme partisipasi yang efektif. Langkah-langkah ini akan memperkuat tata kelola keuangan desa dan mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Beberapa penelitian terdahulu memberikan pemahaman tambahan terkait temuan ini. Sebagai contoh, penelitian oleh (Rosidah et al., 2023) menekankan pentingnya pemantauan dan pertanggungjawaban dalam mengurangi risiko agen (pemerintah) yang tidak bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (masyarakat) dalam pengelolaan dana publik. Namun, penelitian ini tidak secara

khusus mempertimbangkan peran perangkat desa dalam konteks pengelolaan dana desa.

Di sisi lain, penelitian oleh (Rahadi, 2023) menyoroti peran penting kapasitas administrasi dalam memastikan efektivitas pengelolaan dana publik di tingkat lokal. Hasil penelitian ini mungkin sejalan dengan temuan bahwa peran perangkat desa tidak signifikan dalam pengelolaan APBDes di Kecamatan Secangang, mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain seperti kapasitas administrasi mungkin lebih dominan dalam memengaruhi kualitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami secara lebih mendalam faktor-faktor apa yang memengaruhi pengelolaan APBDes di Kecamatan Secangang. Pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran perangkat desa dan faktor-faktor lain yang memengaruhi pengelolaan dana desa akan memberikan dasar yang lebih kuat bagi pengembangan strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan APBDes di tingkat desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka peneliti menyimpulkan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes di Kecamatan Secanggang, dengan arah pengaruh positif. Hal ini yang artinya jika semakin baik akuntabilitas maka semakin baik pengelolaan APBDES yang di lakukan pada Pemerintah Desa Tersebut.
2. Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes di Kecamatan Secanggang, dengan arah pengaruh positif. Hal ini yang artinya jika semakin baik Transparansi maka semakin baik pengelolaan APBDES yang di lakukan pada Pemerintah Desa Tersebut.
3. Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes di Kecamatan Secanggang, dengan arah pengaruh positif. Hal ini yang artinya jika semakin baik Peran perangkat desa maka semakin baik pengelolaan APBDES yang di lakukan pada Pemerintah Desa Tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu :

1. Dalam rangka Peningkatan Kesadaran dan Implementasi Akuntabilitas pemerintah desa harus mendorong kesadaran dan komitmen yang lebih besar terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas di tingkat desa dengan mengadakan pelatihan dan penyuluhan bagi staf administratif dan

perangkat desa. Hal ini akan membantu memperkuat praktik pengelolaan APBDes yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

2. Penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterbukaan informasi terkait APBDes kepada masyarakat. Desa dapat mempertimbangkan penyediaan platform informasi atau pertemuan rutin dengan warga untuk menyampaikan informasi terkait alokasi dan penggunaan dana desa secara lebih transparan.
3. Peran perangkat desa merupakan elemen penting dalam pengelolaan APBDes. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kerjasama antara perangkat desa dengan pemerintah setempat dan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, forum diskusi, dan pembentukan tim kerja yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, M. F. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 85–91.
- Amelia, M., Oktariansyah, & Rosadian, A. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(1), 4–5.
- Andrianto, & Nico. (2007). *Transparansi dan akutanbiitas public melalui eGonerment*. Bayumedia Publising.
- Anggraeni, P. D., & Yuliani, N. L. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Kajoran). *Prosiding 2nd Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Techonolgy*, 266–284.
- Astomo, P. (2018). Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 282. <https://doi.org/10.31078/jk1523>
- Azwar, S. (2010). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Dewi, N., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 1269. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p16>
- Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. *Indonesian Journal of Business and Management*, 4(1), 87–96. <https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184>
- Garrett, J., Hoitash, R., & Prawitt, D. F. (2014). Trust and financial reporting quality. *Journal of Accounting Research*, 52(5), 1087–1125.
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas. *JUrnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 15–30.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep & Aplikasi*.

- Julita, E., & Abdullah, S. (2020). *Transparasi Dalam Pengelolaam Kecamatan Sukakarya Kota Sabang*). 5(2), 213–221.
- Komariah, A., & Satori, D. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif* (alfabeta (ed.)).
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi IlmuManajemen.
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi.
- Pebrianti, G. M. (2021). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarkat Di Desa Sumobito (Studi Kasus Pada Desa Sumobito Kecamatan Sumobito)*. Stie Pgri Dewantara Jombang.
- Prihartini, E., Mahiri, E. A., Hakim, A., Kurnadi, E., Endorse, C., & Konsumen, M. B. (2022). Pengaruh Brand Image Dan Celebrity Endorse Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Produk Toko Elzatta Majalengka. *Jurnal Co ...*, 775–783.
- Raba, M. (2006). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. UMM Press.
- Rahadi, F. D. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat. *Journal of Law and Economics*, 2(2), 64–71.
- Rahmayani, M. W. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi pada Seluruh Desa di Kecamatan Kadipaten). *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(2), 703–713.
<https://doi.org/10.31949/entrepreneur.v3i2.2984>
- Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia: Berbasis Website. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 20(2), 110–126.
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4>
- Rosidah, I., Kesumah, P., & Rizka, R. B. (2023). Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: EMBA*, 2(1), 137–156.
- Sari, D. P., Andriani, E., & Hanum, Z. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Jurnal Bisman, 8-18

- Saragih, F. (2017). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Skpd Se Kota Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, (8).
- Sari, M. (2023). Model Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Kabupaten Langkat Dengan Structural Equation Model Analysis. *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.
- Sari, E. N., Lubis, A., & Astuty, W. (2020). Tha Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa Serta Dampak Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Deli Serdang: Sistem Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(2), 107-126.
- Sinambela, E. (2014). Efektivitas Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara. *Ekonomikawan*, 14(2), 155–170.
- Sinambela, E., & Pohan, A. K. R. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 53(9), 1689–1699.
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 93–101.
<https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2527>
- Soerjono Soekanto. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. 213.
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di desa Tumulung Satu kecamatan Tareran kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 6(1), 161029.

- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1–20.
- Wijaya, E., & Roni, M. F. (2019). Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 165. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.165-184>



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/04/10/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 04/10/2023

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ade Lili Maryanda
NPM : 2005170114
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Judul 1 : 1. perlu dilihat sejauh mana kompetensi aparatur pengelolaan dana desa berkontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Apakah kurangnya kompetensi aparatur desa dapat menjadi hambatan dalam pengelolaan dana desa yang akuntabel. 2. Jika partisipasi masyarakat rendah, ini bisa menjadi masalah karena pengawasan publik yang kurang dapat mengurangi akuntabilitas. 3. Peran sistem pengendalian internal dalam pengelolaan dana desa juga perlu diteliti, Masalahnya sejauh mana sistem pengendalian internal yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas atau sebaliknya jika sistem ini tidak efektif. Judul 2 : 1. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa. Ini bisa mencakup kekurangan keterampilan, pengetahuan, atau pelatihan yang diperlukan untuk mengelola dana dengan efektif. 2. Jika sasaran anggaran tidak jelas atau spesifik, ini dapat menyebabkan penyalahgunaan dana atau alokasi yang tidak efektif. 3. Jika sistem pelaporan keuangan tidak transparan atau tidak memadai maka sulit untuk memantau atau memverifikasi penggunaan dana dengan benar. Judul 3 : 1. Apakah sistem akuntansi sektor publik yang ada sudah cukup efektif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dana publik. 2. Apakah dana desa telah di alokasikan dengan benar dan digunakan secara efisien untuk tujuan pembangunan fisik desa yang di inginkan.

Rencana Judul : 1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Pengaruh Kapasitas Sumber data Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan sistem Pelaporan keuangan Terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Pengaruh pertanggung jawaban akuntansi sektor publik dan efektivitas alokasi Dana desa terhadap pembangunan fisik desa

Objek/Lokasi Penelitian : Desa se-kecamatan Secanggang, Kab. Langkat

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



(Ade Lili Maryanda)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/04/10/2023

Nama Mahasiswa : Ade Lili Maryanda
NPM : 2005170114
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 04/10/2023
Nama Dosen pembimbing* : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA (16 Oktober 2023)

Judul Disetujui**

" Pengaruh akuntabilitas, transparansi
dan peran pemerintah desa dalam
pengelolaan APBD Desa " pada Desa
di Kecamatan Seconggang "

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, 26 Oktober 2023

Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., AKCA)

Keterangan:
*) Ditisi oleh Pimpinan Program Studi
**) Ditisi oleh Dosen Pembimbing
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU
 Kepada Yth.
 Bapak Dekan
 Fakultas Ekonomi
 Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

20

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : A D E L I L I M A R Y A N D A
 NPM : 2 0 0 5 1 7 0 1 1 4
 Tempat/Tgl Lahir : T E L A G A J E R N I H
 0 3 N O V E M B E R 2 0 0 2
 Program Studi : Akuntansi
 Alamat Mahasiswa : T E L A G A J E R N I H D U S U N E
 Tempat Penelitian : D E S A D I K E C A M A T A N S E C A N G G A
 N G
 Alamat Penelitian : K E C A M A T A N S E C A N G G A N G

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
 Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam
 Pemohon


 (Riva Nur Hanzy)


 (ADE LIU MARYANDA)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://feb.umsu.ac.id february@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 3471/IL3-AU/UMSU-05/F/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Medan, 15 Jumadil Awal 1445 H
29 November 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Desa Di Kecamatan Secanggang
Kecamatan Secanggang
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ade Lili Maryanda
Npm : 2005170114
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pada Desa Di Kecamatan Sicanggang

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal

Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN SECANGGANG
DESA SECANGGANG**

Sekretariat : Jln. Pekan Secanggang No. 168 Kode Pos. 20855

Nomor : 420 ~~424~~ / SC / XII / 2023
Sifat : -
Lamp : -
Hal : Ijin Riset Pendahuluan

Secanggang, 11 Desember 2023
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UMSU
di -
Medan

Sehubungan dengan Surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nomor : 3471/II.3-AU/UMSU-05/F/2023, tanggal 29 November 2023, Tentang Izin riset pendahuluan

Dengan ini Pemerintah Desa Secanggang memberikan ijin kepada Mahasiswa :

Nama : ADE LILI MARYANDA
NIM : 20051701114
Program Study : Akutansi
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan peran Perangkat Desa Terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Pada Desa di Desa Secanggang.

Untuk melaksanakan Riset Pendahuluan di Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat..

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

AN.PJ. KEPALA DESA SECANGGANG





PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN SECANGGANG
DESA TELAGA JERNIH

Sekretariat Jln. Tengah No : Tlp (061) Kode Pos : 20855

Nomor : 470-1033/TJ/XII/2023
Lampiran : -

Telaga Jernih, 11 Desember 2023
Kepada Yth :
Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di_

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubung dengan surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 3471/II.3- AU/UMSU-05/F/2023 perihal Permohonan Izin Riset Pendahuluan, maka dengan ini Kepala Desa Telaga Jernih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat pada prinsipnya mengizinkan penelitian tersebut dengan syarat hasil penelitian harus disampaikan tembusannya kepada Kepala Desa Telaga Jernih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, Izin penelitian ini diberikan kepada :

Nama : ADE LILI MARYANDA
NPM : 2005170114
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pada Desa Di Kecamatan Secanggang

Demikianlah surat balasan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.





**PEMERINTAH DESA KARANG GADING
KECAMATAN SECANGGANG
KABUPATEN LANGKAT**

Jl. Ampera No. 333 Kacangan Telp.

Kode Pos. 20855

Kacangan, 11 Desember 2023

Nomor : 440-861/KG/XII/2023
Lamp : -
Hal : **IZIN RISET PENDAHULUAN**

Kepada Yth.
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS UMSU MEDAN**
di
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Nomor : 347/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 tertanggal : 29 November 2023, Prihal **Izin Riset Pendahuluan**, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : **ADE LILI MARYANDA**
NPM : 2005170114
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pada Desa Di Kecamatan Secanggang.

kami perkenankan/izinkan kepada mahasiswa/i tersebut diatas untuk melaksanakan kegiatan Riset pendahuluan di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat sebagai bahan penyusunan Skripsi bagi yang bersangkutan.

Demikian Surat ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.





**PEMERINTAH DESA CINTA RAJA
KECAMATAN SECANGGANG
KABUPATEN LANGKAT**

Alamat : Jalan Terusan Secanggang Desa Cinta Raja

Kode Pos : 20855

Nomor : 470 - / CR / XII / 2023

Cinta Raja, 11 Desember 2023

Lampiran : -

Kepada Yth,

Hal : Surat Balasan Izin Penelitian

**Dekan Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara**

Di,-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 3471/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 Perihal Izin Riset Pendahuluan yang diajukan mahasiswa/i saudara atas nama:

Nama : ADE LILI MARYANDA
NPM : 2005170114
Program Studi : Akutansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa di Kecamatan Secanggang

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa/i tersebut diatas dengan syarat hasil penelitian harus disampaikan tembusannya kepada Kepala Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat

Demikian surat balasan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA CINTA RAJA



SURAT NO



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN SECANGGANG
DESA PANTAI GADING**

Jl. Rintis

Kodes Pos : 20855

Telp.

Pantai Gading, 11 Desember 2023

Nomor : 470.789/PG/XII/2023
Lampiran :-

Kepada Yth :
**Dekan Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara.**

Di _
Tempat

Dengan Hormat :

Sehubungan Dengan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 3471./11.3-AU/UMSU-05/F/2023 tentang permohonan ijin Risert Pendahuluan, maka dengan ini Kepala Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, pada dasarnya memberikan Ijin Penelitian Tersebut dengan syarat hasil Penelitian harus di sampaikan Tembusannya Kepada Kepala Desa Pantai Gading,

Ijin Penelitian ini di Berikan Kepada :

Nama : **ADE LILI MARYANDA**
NPM ; 2005170114
Program Studi : Akutansi
Smester : VII (VII)
Judul Skripsi : Pengaruh Akutansi, Transparansi dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa yang ada di Kecamatan Secanggang.

Demikianlah surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rintis, 11 Desember 2023
KEPALA DESA PANTAI GADING

ARIYANTO.SH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/DAN-PT/Ak.KP/PT/KI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 Website: <http://feb.umsu.ac.id> Email: feb@umsu.ac.id Facebook: [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) Instagram: [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) Twitter: [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan) YouTube: [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 3471/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2023

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
 Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
 Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 26 Oktober 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ade Lili Maryanda
 N P M : 2005170114
 Semester : VII (Tujuh)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Peran Perangkat Desa
 Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 (APBDes) Pada Desa Di Kecamatan Sicanggang

Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 29 November 2024
4. Revisi Judul

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 15 Jumadil Awal 1445 H
 29 November 2023 M



Tembusan :
 1. Peninggal





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : ADE LILI MARYANDA
NPM : 2005170114
Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., AK.,CA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) PADA DESA DI KECAMATAN SECANGGANG

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab1	—		
Bab2	—		
Bab3	guncak analisis Data SEMPLS	1/2 24	3/1
Daftar Pustaka	Sitasi dosen umsu	1/2 24	3/1
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	perbaiki ulm -	1/2 24	3/1
Persetujuan Seminar Proposal	ACC proposal lanjut ke seminar Propes	1/2 24	3/1

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum.. SE.. M.Si)

Medan, Februari 2024

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE.. Msi.. Ak.. CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : ADE LILI MARYANDA
NPM : 2005170114
Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., AK., CA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) PADA DESA DI KECAMATAN SECANGGANG

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab1	gunakan log pengaduan APBDes dalam analisis masalah hukum desa	12/1/24	
Bab2	Tambah artikel dikumpulkan konseptual tambah lagi indikator di masing variabel	12/1/24	
Bab3	gunakan SEMPLS	12/1/24	
Daftar Pustaka	Buat rangkuman referensi	12/1/24	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Buat angket pertanyaan	12/1/24	
Persetujuan Seminar Proposal	—		

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum., SE., M.Si)

Medan, Feb 2024

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., Msi., Ak., CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : ADE LILI MARYANDA
NPM : 2005170114
Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., AK., CA
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Penelitian : PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) PADA DESA DI KECAMATAN SECANGGANG

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab1	Perbaiki ILM, fenomena belum jelas, identifikasi masalah belum didukung	15/12 23	3/
Bab2	Perbaiki indikator minimal 3 referensi disertai variabel kerangka konseptual	15/12 23	3/
Bab3	Populasi dan sampel, perbaiki label operasional	15/12 23	3/
Daftar Pustaka	Belum ada gunakan mendeley sitasi dosen UMSU	15/12 23	3/
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	—		
Persetujuan Seminar Proposal	—		

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum., SE., M.Si)

Medan, Feb 2023

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., Msi., Ak., CA)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 22 Februari 2024* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Ade Lili Maryanda*
NPM. : 2005170114
Tempat / Tgl.Lahir : Telaga Jernih, 03 November 2002
Alamat Rumah : Desa Telaga Jernih, Dusun E, Kecamatan Secanggang
Judul Proposal : Pengaruh Akuntabilitas Transparansi Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Pada Desa Di Kecamatan Secanggang

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>latar belakang masalah</i>
Bab II
Bab III	<i>waktu penelitian</i>
Lainnya	<i>metode penelitian atau pedoman</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 22 Februari 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Harum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA

Pembanding

Elizar Sihambela, S.E., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis*, 22 Februari 2024 menerangkan bahwa:

Nama : Ade Lili Maryanda
NPM : 2005170114
Tempat / Tgl.Lahir : Telaga Jernih, 03 November 2002
Alamat Rumah : Desa Telaga Jernih, Dusun E, Kecamatan Secanggang
Judul Proposal : Pengaruh Akuntabilitas Transparansi Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Pada Desa Di Kecamatan Secanggang

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA*

Medan, 22 Februari 2024

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanuni, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA

Pembanding

Elizar Simambela, S.E., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan

25 / 04 - 2024

Assoc. Prof. Dr. Ade Gungvan, SE, M.Si
NIDN : 0105087601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Nomor : 1201/II.3-AU/UMSU-05/F/2024
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 27 Syawal 1445 H
06 Mei 2024 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Desa di Kecamatan Secanggang
Kecamatan Secanggang
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Ade Lili Maryanda
N P M : 2005170114
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Pada Desa di Kecamatan Secanggang

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal

Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502





**PEMERINTAHAN KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN SECANGGANG
DESA PANTAI GADING**

Jl. Rintis

Kodes Pos : 20855

Telp.

SURAT KETERANGAN

Nomor: 470.123/PG/V/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : **ARIYANTO,SH**
Jabatan : Kepala Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang
Kabupaten Langkat

Dengan ini menerangkan bahwa ;

Nama : **ADE LILI MARYANDA**
NPM : 2005170114
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)

Benar nama tersebut di atas telah selesai melaksanakan kegiatan pengambilan Data/Riset di Desa Pantai Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat , guna mendukung perolehan sumber data-data pelengkap penyelesaian penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikannya dengan judul “ *Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa di Kecamatan Secanggang*”.

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rintis, 13 Mei 2024

a/n-KEPALA DESA PANTAI GADING

Sekdes

**SYAHARUDDIN**



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN SECANGGANG
DESA SECANGGANG

Sekretariat : Jln. Pekan Secanggang No. 168 Kode Pos. 20855

Secanggang, 13 Mei 2024

Nomor : 420 - 27 / SC / V / 2024

Lamp : -

Hal : Telah Mengadakan Penelitian (Riset)

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di -

Tempat

Sehubungan dengan Surat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nomor : 1201/II.3.AU/UMSU-05/F/2024. Dengan ini menerangkan Bahwa Mahasiswa/i bernama :

Nama : ADE LILI MARYANDA

NPM : 20051701114

Jenis Kelamin : Perempuan

Program Study : Akutansi

Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Pada Desa di Kecamatan Secanggang

Telah selesai mengadakan penelitian (Riset) di Desa Secanggang Kecamatan Secanggang mulai tanggal 21 Nopember 2024 s/d 13 Mei 2024.

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



KECAMATAN SECANGGANG

T. SYAIFUL ANHAR



**PEMERINTAH DESA CINTA RAJA
KECAMATAN SECANGGANG
KABUPATEN LANGKAT**

Alamat : Jalan Terusan Secanggang Desa Cinta Raja

Kode Pos : 20855

Nomor : 140- 82/ CR/ VI/ 2024
Lampiran : -
Hal : Keterangan Menyelesaikan Riset

Cinta Raja, 13 Mei 2024
Kepada Yth :
Bapak/Ibu Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di,-

Tempat

Merujuk Surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 1201/II.3-AU/UMSU-05/F/2024 tanggal 06 Mei 2024 perihal menyelesaikan Riset, bagi mahasiswa atas nama :

Nama : Ade Lili Maryanda
NPM : 2005170114
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akutansi

Bahwa benar yang bersangkutan telah menyelesaikan Riset di Kantor Desa Cinta Raja Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dan selanjutnya Surat Keterangan ini dapat dipergunakan untuk melanjutkan Penyusunan/Penulisan Skripsi pada Bab IV – V dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian disampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN SECANGGANG
DESA KARANG GADING

Jl. Ampera No. 333 Kacangan Telp. Kode Pos. 20855

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 440-351/KG/V/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BAHRUL**
Jabatan : Kepala Desa Karang Gading

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ADE LILI MARYANDA**
NPM : 2005170114
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)

benar nama tersebut diatas telah selesai melaksanakan kegiatan Pengambilan Data/riset di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang, guna mendukung perolehan sumber data-data pelengkap Penyelesaian penyusunan Skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikannya dengan judul **"Pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Pada Desa di Kecamatan Secanggang"**.

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kacangan, 13 Mei 2024
Kepala Desa Karang Gading

BAHRUL



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KECAMATAN SECANGGANG
DESA TELAGA JERNIH

Sekretariat Jln. Tengah No :

Tlp (061)

Kode Pos : 20855

Nomor : 470- 199 /TJ/V/2024
Lampiran : -
Hal : Selesai Riset

Telaga Jernih, 13 Mei 2024

Kepada Yth :
Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di_

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubung dengan surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor : 1201/II.3-AU/UMSU-05/F/2024 perihal menyelesaikan Riset , maka dengan ini Kepala Desa Telaga Jernih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat menerangkan bahwa :

Nama : ADE LILI MARYANDA
NPM : 2005170114
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Pada Desa di Kecamatan Secanggang

Benar telah selesai melaksanakan Riset di Desa Telaga Jernih Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

KEPALA DESA TELAGA JERNIH



KUESIONER PENELITIAN

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada,

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/I Responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir (skripsi) sebagai mahasiswa Program studi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini saya :

Nama : Ade Lili Maryanda

NPM : 2005170114

Jurusan / Fakultas : Akuntansi / Ekonomi dan Bisnis

Bermaksud melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Peran Perangkat desa terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pada Desa di Kecamatan Secanggang** “

Untuk itu saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak/ibu/saudara/i untuk menjadi responden dan menjawab seluruh item pernyataan dalam kuesioner ini secara objektif sesuai dengan petunjuk pengisian. **Kuesioner ini hanya untuk kepentingan skripsi tidak untuk dipublikasikan secara meluas untuk menjaga kerahasiaan data dalam kuesioner ini.** Atas kerja samanya, bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Ade Lili Maryanda

Unggul | Cerdas | Terpercaya

A. Identitas Responden

- Nama Responden : _____
- Desa : _____
- Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
- Umur : <20 Tahun 20-30 Tahun
 31-40 Tahun 41-50 Tahun
 >50 Tahun
- Jabatan : Kepala Desa Sekretaris Desa
 Bendahara Desa Kaur/Kasi Desa
- Pendidikan Terakhir : SD SMP
 SMA/Sederajat Diploma
 Sarjana (S1) Magister (S2)
 Lainnya
- Masa Kerja : < 5 Tahun 5-10 Tahun
 > 10 Tahun

B. Profil Desa

- Nama Desa : _____
- Alamat Desa : _____

C. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Petunjuk Pengisian Kuesioner, peneliti mengharapkan Bapak/Ibu/Saudara/i menjawab pertanyaan dibawah ini sesuai dengan kondisi tempat Bapak atau ibu bekerja dengan memberikan tanda ceklis (✓).Setiap butir pertanyaan disediakan jawaban dengan 5 kriteria penilaian, Yakni

Pernyataan Jawaban	Skor
Sangat Baik (SB)	5
Baik (B)	4
Cukup Baik (CB)	3
Kurang Baik (KB)	2
Sangat Tidak Baik (STB)	1

D. Daftar Pertanyaan

Variabel Akuntabilitas (X1)

No	Pernyataan	SB	B	CB	KB	STB
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.					
2.	Laporan keuangan yang disajikan telah memuat dan mengungkapkan informasi yang cukup memadai.					
3.	Pemerintah desa telah mengikuti prosedur pelaksanaan pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan desa sesuai dengan jumlah yang ditentukan.					
4.	Penyusunan Laporan pertanggungjawaban memuat realisasi pendapatan, belanja desa dan pembiayaan desa secara lengkap.					
5.	Pemerintah desa tepat waktu dalam menyusun laporan keuangan desa					
6.	Pemerintah desa tepat waktu dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.					
7.	Informasi anggaran dana desa bisa diakses atau dilihat diwebsite desa.					

Sumber (Nurkhasanah,2019)

Variabel Transparansi (X2)

No	Pernyataan	SB	B	CB	KB	STB
	Ada tidaknya kerangka hukum bagi transparansi					
1.	Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur transparansi.					
2.	Adanya Kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan pertanggungjawaban bagi semua aspek kunci di manajemen fiscal.					
	Adanya akses masyarakat terhadap Transparansi anggaran.					
1.	Adanya keterbukaan dalam rangka anggaran (Proses penganggaran).					
2.	Dipublikasikan hasil laporan anggaran yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang.					
	Adanya Audit independen dan efektif.					
1.	Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.					
2.	Adanya system peringatan diri (<i>early warning system</i>) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.					
	Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.					
1.	Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran					
2.	Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.					

Sumber (Andrianto,2007:21)

Variabel Peran Perangkat Desa (X3)

No	Pernyataan	SB	B	CB	KS	STB
1.	Perangkat desa terkait terlibat dalam proses perencanaan penggunaan dan desa.					
2.	Perangkat desa terkait memberikan masukan tentang rancangan APBDes kepada Kepala Desa dan BPD.					
3.	Perangkat desa terkait terlibat dalam proses pelaksanaan penggunaan dana desa.					
4.	Perangkat desa terkait bersama kasi menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam perdes tentang APBDes.					
5.	Perangkat desa terkait memberikan masukan tentang perubahan APBDes.					
6.	Perangkat desa terkait terlibat dalam proses penatausahaan penggunaan dana desa.					
7.	Perangkat desa terkait memberikan masukan dan melakukan audit partisipatif.					

Sumber : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Variabel Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y)

No	Pernyataan	SB	B	CB	KB	STB
	Tahap Perencanaan					
1.	Kepala desa menyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu enam tahun. RPJMDes diterapkan paling lambat tiga bulan setelah kades dilantik.					
2.	Kepala Desa bersama BPD menyusun rencana kerja pembangunan desa (RKDes).					
3.	Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) berdasarkan RKPDes.					
4.	Sekretaris Desa melaporkan rancangan peraturan dan tentang Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) kepada kepala desa.					
5.	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan dana tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada BPD untuk dibahas bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.					
	Tahap Pelaksanaan					
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa.					
2.	Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.					

3.	Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.					
4.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan ke Kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.					
Tahap Penatausahaan						
1.	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan secara rutin.					
2.	Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.					
Tahap Pelaporan						
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kepada Bupati/Wali kota berupa laporan semester pertama yaitu laporan realisasi APBDes dan Laporan semester akhir yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun sebelumnya.					
2.	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes.					
3.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.					
Tahap pertanggungjawaban						
1.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) kepada Bupati atau Walikota melalui pihak kecamatan setiap akhir tahun.					
2.	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan, sementara laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berjalan berikutnya.					
3.	Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes di informasikan kepada masyarakat seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi.					

Sumber : Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

IDENTITAS RESPONDEN

No	Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin
1	Amin Dairabi,S.H	Kepala Desa	51 tahun	Laki -Laki
2	Sari Devi	Sekretaris Desa	35 tahun	Perempuan
3	Syaiful	Bendahara Desa	56 tahun	Laki -Laki
4	Rizki Abdi	Kaur/Kasi Desa	23 tahun	Laki -Laki
5	Srianto	Kepala Desa	55 tahun	Laki -Laki
6	Atheri	Sekretaris Desa	47 tahun	Laki -Laki
7	Henny Kusriani	Bendahara Desa	28 tahun	Perempuan
8	Irma Soraya	Kaur/Kasi Desa	31 tahun	Perempuan
9	Sugireni	Kepala Desa	59 tahun	Laki -Laki
10	Purwanto	Sekretaris Desa	38 tahun	Laki -Laki
11	Susi Wardani	Bendahara Desa	34 tahun	Perempuan
12	Linda sari	Kaur/Kasi Desa	29 tahun	Perempuan
13	Tengku Syaiful Anwar	Kepala Desa	60 tahun	Laki -Laki
14	Syahyuni	Sekretaris Desa	35 tahun	Perempuan
15	Ernawati	Bendahara Desa	32 tahun	Perempuan
16	M. Ikhsan	Kaur/Kasi Desa	32 tahun	Laki -Laki
17	Suratno	Kepala Desa	63 tahun	Laki -Laki
18	Chandra Wijaya	Sekretaris Desa	25 tahun	Laki -Laki
19	Tri Syalianita	Bendahara Desa	36 tahun	Laki -Laki
20	Nurhayati	Kaur/Kasi Desa	51 tahun	Perempuan
21	Kasino	Kepala Desa	53 tahun	Laki -Laki
22	M.Yus Arbiansyah	Sekretaris Desa	36 tahun	Laki -Laki
23	Nurhafi Ayunda	Bendahara Desa	37 tahun	Perempuan
24	Almaidah	Kaur/Kasi Desa	25 tahun	Perempuan
25	Miswanto	Kepala Desa	58 tahun	Laki -Laki
26	Nurhadi Amri	Sekretaris Desa	45 tahun	Laki -Laki
27	Rina Insanah	Bendahara Desa	32 tahun	Perempuan
28	Umdhatus solehah	Kaur/Kasi Desa	23 tahun	Perempuan
29	Misran	Kepala Desa	60 tahun	Laki -Laki
30	Mandar	Sekretaris Desa	49 tahun	Laki -Laki
31	Syahputra	Bendahara Desa	37 tahun	Laki -Laki
32	Anita Ramadhani	Kaur/Kasi Desa	34 tahun	Perempuan
33	Ariyanto. S.H	Kepala Desa	48 tahun	Laki -Laki
34	Saharuddin	Sekretaris Desa	43 tahun	Laki -Laki
35	Siti Fatimah	Bendahara Desa	35 tahun	Perempuan

36	Fatmawati	Kaur/Kasi Desa	39 tahun	Perempuan
37	Bahrul	Kepala Desa	59 tahun	Laki -Laki
38	M.Yusuf Kurniawan	Sekretaris Desa	45 tahun	Laki -Laki
39	Rezki Putra Ananda	Bendahara Desa	31 tahun	Laki -Laki
40	Raudhatul jannah	Kaur/Kasi Desa	24 tahun	Perempuan

HASIL OLAH DATA SEMPLS

	X1	X2	X3	Y
X1-1	0.131			
X1-2	0.207			
X1-3	0.224			
X1-4	0.841			
X1-5	0.884			
X1-6	0.721			
X2-1		-0.110		
X2-10		0.821		
X2-11		0.959		
X2-12		0.921		
X2-13		0.911		
X2-14		0.842		
X2-2		0.212		
X2-3		-0.027		
X2-4		0.011		
X2-5		0.314		
X2-6		0.192		
X2-7		0.113		
X2-8		0.836		
X2-9		0.917		

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_c)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
X1	0.762	0.804	0.863	0.679
X2	0.956	0.958	0.964	0.794
X3	0.924	0.932	0.941	0.723
Y	0.973	0.976	0.975	0.668

	R-square	R-square adjusted
Y	0.997	0.997



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Ade Lili Maryanda

NPM : 2005170114

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul Penelitian : Pengaruh Akuntabilitas Transparansi Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Pada Desa di Kecamatan Secanggang.

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 2024

Saya yang menyatakan

Ade Lili Maryanda

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA PRIBADI**

1. Nama : Ade Lili Maryanda
NPM : 2005170114
Tempat Tanggal lahir : Telaga Jernih, 03 November 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Dusun E, Desa Telaga Jernih
Program Studi : Akuntansi
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Email : adelilimaryanda@gmail.com
HP : 082235085294
2. Nama orang tua
Ayah : Srianto
Ibu : Markiseh
3. Jenjang Pendidikan
- SD Negeri 056009 Telaga Jernih (2008-2014)
 - SMP Negeri 2 Stabat (2014-2017)
 - SMK Negeri 1 Stabat (2017-2020)
 - Tercatat sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2020 sampai dengan sekarang

Medan, Mei 2024

Hormat Saya



Ade Lili Maryanda